



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EMPLEMENTASI PROGRAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK SD DI KOTA PADANG

SKRIPSI



FATHIAH LISWAR MUNAF
06194029

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNRTRRSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Fathiah Liswar M unaf
Nomor Induk Pokok : 06194029
Judul Skripsi : Implementasi Program Buku Sekolah
Elektronik SD di Kota Padang

“Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas”.

Pembimbing I



Drs. Yoserizal, M.Si

NIP. 196008251989011001

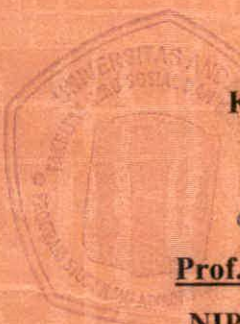
Pembimbing II



Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

NIP. 19810503 200501 1001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

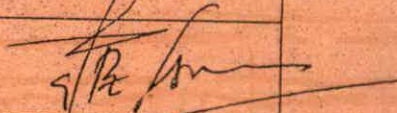
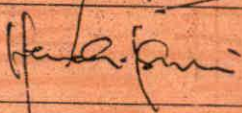
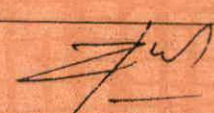
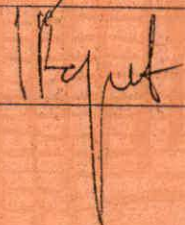


Prof. Dr.rer.soz Damsar, MA

NIP. 19630703 198901 1002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Siding Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada hari Kamis tanggal 11 November 2010, bertempat di Ruang Sidang Jurusan Sosiologi, dengan tim penguji :

Tim penguji	Jabatan	Tanda tangan
Prof.Dr. Damsar, MA	Ketua	
Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Sekretaris	
Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc	Anggota	
Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	Anggota	
Drs. Yaserizal, M.Si	Anggota	
Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Anggota	

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Drs. Alfitri, MS

NIP. 196501061989011001



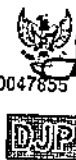
PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **"Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik SD di Kota Padang"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 27 Desember 2010

Yang Membuat Pernyataan



Fathiah Liswar Munaf

BP. 06 194 029

Alhamdulillahilahi rabbil alamin

Segala puji hanya untuk Mu ya Rabb

Jutaan nikmat yang tak sanggup ku ganti

Walaupun laut ku jadikan tinta dan pohon ku jadikan pena

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk kedua orang tua ku, ayah Liswar Munir dan

manina (alm) Hamnah Nurdin Salam, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih

sayang dan perjuangannya membesarkan dan mendidikku. Untuk semua kakakku

(Bayung, Alif, Deni, Malik, Upi, Lina, Ade, Oyak, Nuna) gompata ... udah banyak

bantuan ia.. and for my twins Fauziah (Chayoo.. tinggal u aja yang belum tamat.. smoga

cepat dapat gelar Sarjana Jerman). Te Giah n Te Gah... makasi atas semangat dan doanya.

Special thanks for...

Member Sketbi : K dien (chayoo k. semoga kita bisa wisuda bareng), K Gled, Micky, Lina,

Pristanificia P, Mita (keep fighting.. u can do it.. wisuda Juni ya), Delfi, Merry, Radha,

Tessa (tissuu), Petri, Adah dan semua Kk yang pernah tinggal di wisma ini.. gompata...

Temen-temen seperjuangan di Ilmu Administrasi Negara 06 : Dita, Nicky, Susi, Mira
(semangat pertahanannya), Titi, Eka, Kiki, Ulma, Yred, Caca, Sup, Diki, Zeti (tetap
semangat ya), Boil, Dini, Angel, Lusi, Geneng (keep fighting), Arlan, Buaya, Ridho, DW,
semua KK di 20 07, 20 07 (Jamil, makasi bukunya ya, Tajri, Afdal, dll) n semua
keluarga besar Ilmu Administrasi Negara.

Allikhuwah di F59 F959P, danke atas ukhuwah yang diberikan, Rabbani 910 (Mni
Nanda, KK Ulm, Bevi, Zola, Yosi, Rika), temen-temen di Andalas Cendikia, M9330
Mahasiswa (Prima, Paiman, Resti, Adji), R3MC 910 (Tomo, Fadil, Rika, Yona, Ayu),
Temen-temen RKN Bongol, keep istiqomah.. n hamasah.

Untuk semua temen-temen dimanapun kalian berada.. maaf, kalau ada yang terlupakan
sama Fatiha, dan untuk semua orang-orang yang telah memberikan bantuan, dukungan
dan ukhuwah setulus hati.. terima kasih.

24 for 7 from Monday to Sunday night we always together
Kau ku abadi salami gemilang
Riangnya saat kita tertawa..
asyik senda dan bercita..
Suka duka manisnya kenangan
Bersemedi di ingatan, semoga kau kekal sepanjang zaman
Kita akan tetap bersama dalam menggaris setiap cila..

Padang, Desember 2010
Fatiha Lirwan Munaf

ABSTRAK

Fathiah Liswar Munaf (06194029), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing I Drs. Yoserizal, M. Si dan pembimbing II Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Judul skripsi "Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik SD di Kota Padang".

Buku merupakan salah satu sarana pembelajaran siswa, namun harga buku cukup mahal. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan buku murah melalui program buku sekolah elektronik (BSE) yang dapat diunduh melalui situs <http://bse.depdiknas.go.id>. Untuk menggunakan program ini diperlukan perangkat komputer, serta jaringan internet.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Padang, dan tiga sekolah dasar di Kota Padang. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian adalah SDN 03 Kampung Dalam, SDN 15 Ulu Gadut, SDN Percobaan Ujung Gurun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Hogwood dan Gunn.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BSE SD di Kota Padang sudah berjalan cukup baik dengan dinikmatinya program BSE pada seluruh sekolah sejak tahun 2009. Implementasi BSE dibagi dalam dua bentuk, yakni BSE dalam bentuk virtual yang dapat diakses menggunakan internet dan BSE dalam bentuk cetak. Sekolah yang sudah menggunakan BSE dalam bentuk virtual dan cetak adalah SDN Percobaan. Sedangkan SDN 03 dan SDN 15 menggunakan BSE dalam bentuk cetak. Ini disebabkan kedua sekolah ini tidak memiliki komputer dan internet.

Berdasarkan indikator implementasi menurut Hogwood dan Gunn, hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor eksternal seperti pergantian kepala dinas, menteri pendidikan maupun kepala sekolah tidak memberikan pengaruh pada pelaksanaan program. Ketersediaan sumber daya berupa anggaran menjadi beban bagi sekolah, karena sekolah tidak lagi diperbolehkan meminta iuran pada siswa. Disamping itu, untuk mengajarkan BSE dalam bentuk virtual dibutuhkan guru yang dapat menggunakan komputer dan internet. Namun umumnya setiap sekolah hanya memiliki 30% guru yang bisa menggunakannya. Hubungan saling ketergantungan kecil, karena Depdiknas sebagai badan tunggal pelaksana program BSE. Pola komunikasi dilakukan menggunakan sistem komando, dan koordinasi dalam bentuk surat edaran dan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Kata kunci : *BSE, komputer, internet, siswa*

ABSTRACT

Fathiah Liswar Munaf (06194029), Public Administration Department, Social and Political Science Faculty Of Andalas University, Padang. The first counsellor is Drs. Yoserizal, M.Si and the second counsellor is Roni Ekha Putra, S.IP, M.PA. The title of the thesis is "Implementation Of Electronic School Book Program" at Elementary School (SD) In Padang City".

Book is one of peat in student learning, but the book price is expensive enough. So that, the government has issued a policy about cheap book by electronics school book (BSE) program, that can be downloaded from these site: www.bse.depdiknas.go.id. To use this program we need a set of computer and internet.

The research is done in educational department in Padang, and three elementary school in Padang. The research location is SDN 03 Kampung Dalam, SDN 15 Ulu Gadut and SDN Percobaan Ujung Gurun. Qualitative approach is used in these research with description specification. To sharpen the analysis, these research uses Hogwood and Gunn implementation theory.

The result from this research showed that implementation of electronic book program at Elementary School (SD) In Padang City, After running this program for three years, showing the results that good enough, already with this program at all enjoyed students since 2009. implementation of electronic book program divide into two forms, virtual form, could be accessed by internet and BSE in printed. The school that has been using the virtual and print form is SDN Percobaan. Whereas SDN 03 and SDN 15 use BSE print form. That's because both school do not have any computer or internet media.

The strength of indicators in the model theory Hogwood and Gunn, the results showed that external factors such as the turn of the head of department, minister, or head of school does not give effect to the implementation of the program. availability of resources budgetary in the form of a burden for the conventional schools, because schools are no longer allowed to ask for contributions to the students. Besides that, to teach BSE in a virtual form is required of teachers who can use computers and the Internet. but generally each school only has 30% of teachers who use it. reliance mutual relationship also very small, Because of the national education department as the sole executor in this program, and the education agency to be an extension of the area. patterns of coordination and communication in the form of training, seminars, advertising already done. A form of accountability of these programs are delivered in the form of letter of responsibility (SPJ) schools in local education.

Key word : BSE, computer, internet, student

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, keteguhan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul *Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik SD di Kota Padang* yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas dapat penulis selesaikan.

Penyelesaian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Alfitri, MS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
2. Bapak Prof. Damsar, MA sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
3. Bapak Drs. Yoserizal, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, petunjuk, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap tim penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik (Prof. Dr. Damsar, MA, Roza Liesmana, S.IP, M.Si, Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc. Sc, Rozidateno, S.IP, M.AP.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen serta staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat besar artinya bagi penulis.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata semoga ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Padang, Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
Bab II Kerangka Teori	
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
2.2 Teori yang Digunakan	
2.1.1 Kebijakan Publik	14
2.2.2 Implementasi Kebijakan	16
2.3 Skema Pemikiran	23
2.4 Daftar Istilah	24
Bab III Metode Penelitian	
3.1 Pendekatan dan Disain Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Peranan Peneliti	27
3.4 Teknik pemilihan Informan	30
3.5 Unit Analisis	31
3.6 Teknik pengumpulan Data	32
3.7 Uji Pembuktian/ Triangulasi data	34

3.8 Analisis Data	35
Bab IV Deskripsi Lokasi	
4.1 Deskripsi Program Buku Sekolah Elektronik	36
4.2 Kondisi Pendidikan Kota Padang	40
4.5 Deskripsi Dinas Pendidikan Kota Padang	41
4.6 Sekolah yang Ada di Kota Padang	45
Bab V Temuan Data Dan Pembahasan	
5.1 Program Buku Sekolah Elektronik, Tujuan dan Sasaran BSE	48
5.1.1 Berdasarkan Kondisi Eksternal yang Dihadapi Oleh Lembaga /Badan Pelaksana Tidak Akan Menimbulkan Masalah Besar	52
5.1.2 Analisis Program Berdasarkan Sumber Daya yang Memadai, termasuk waktu	60
5.1.3 Analisis Program Berdasarkan Hubungan Saling Ketergantungan Kecil	74
5.1.4 Analisis Program Berdasarkan Pemahaman dan Kesepakatan Terhadap Tujuan	79
5.1.5 Analisis Program Berdasarkan Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna	83
5.1.6 Analisis Program Terhadap Kendala Yang Dihadapi Pada Implementasi Program BSE SD di Kota Padang	92
Bab VI Penutup	
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	98
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pre Test Siswa SD Terhadap Kemampuan Komputer	7
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang	13
Tabel 3.1 Daftar Informan	31
Tabel 4.4 Persentasi Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan di Kota Padang tahun 2008	40
Tabel 4.2 Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Kota Padang	43
Tabel 4.3 Jumlah Kelas, Murid dan Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan	45
Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Sekolah di Kota Padang Tahun 2004-2008	46
Tabel 5.1 Perbandingan Pimpinan Pada Implementasi BSE	55
Tabel 5.2 Alokasi Dana BSE dari Dana BOS SD di Kota Padang	62
Tabel 5.3 Perbandingan Sarana dan Prasarana Sekolah	71
Tabel 5.4 Perbandingan Pemahaman Guru Pada Program BSE	82
Tabel 5.5 Pola Komunikasi Implementasi Program BSE	86
Table 5.6 Indikator Keberhasilan Program BSE	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Tampilan Program BSE di Virtual	37
Gambar 4.2	Susunan Organsasi Dinas Pendidikan Kota Padang	44
Gambar 5.1	Perubahan Tampilan Buku Sekolah Elektronik	49
Gambar 5.2	Instansi Pelaksana Program BSE di Kota Padang	75
Gambar 5.3	Hubungan Program BSE di Kota Padang dengan instansi lain	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan kini menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat. Dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia mulai mengalami peningkatan, baik kualitas maupun kuantitas. Jika dulu masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat dasar, kini masyarakat mulai merasakan arti penting dari sebuah pendidikan hingga jenjang S1, S2, maupun S3, baik di dalam maupun luar negeri. Namun untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini, masyarakat membutuhkan biaya yang cukup besar.

Biaya pendidikan yang cukup besar tersebut merupakan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan seperti : iuran sekolah, seragam, buku pelajaran, dan biaya *study tour*¹. Besarnya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua, kini berdampak negatif pada masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat (Sumbar), setidaknya ada 7.682 siswa mulai dari SD sampai SLTA tahun ajaran 2007/2008 mengalami putus sekolah². Dari data tersebut dapat menggambarkan tingginya angka putus sekolah pada anak usia sekolah.

Salah satu penyebab utama anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Mahalnya harga buku teks pelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa, merupakan

¹ http://todoeducare.posterous.com/Penyebab_Mahalnya_Biaya_Sekolah, diakses pada tanggal 5 Desember 2009

² [www.diknas-padang.org/7.682 Anak Putus Sekolah, Dikpora Siapkan Bea Siswa Rp9,9 M](http://www.diknas-padang.org/7.682-Anak-Putus-Sekolah-Dikpora-Siapkan-Bea-Siswa-Rp9,9-M), diakses pada tanggal 9 November 2009

salah satu penyebab orang tua murid tidak mampu membelikan buku pelajaran yang dibutuhkan oleh anak mereka. Padahal buku merupakan salah satu instrumen penting dalam pendidikan. Buku juga merupakan jembatan komunikasi dalam rangka *transfer of knowledge and transfer of value* dari seorang guru kepada siswa.

Sebagai data awal, peneliti menanyakan pada sejumlah orang tua siswa tentang harga buku anak mereka di sekolahnya masing-masing. Observasi awal yang peneliti lakukan pada salah satu orang tua murid pada tanggal 3 Maret 2010. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Neni (orang tua siswa SMP 10 Padang) bahwa:

“Untuk buku pelajaran kami tidak membayar ke sekolah, tapi untuk LKS (lembar kerja siswa) baru kami bayar. Harga LKS satu pelajaran dengan pelajaran lain berbeda-beda, tapi kalau diratakan satu LKS Rp. 12.000,-/ mata pelajaran. Sedangkan LKS anak saya yang duduk di SMP ada 9, jadi saya harus bayar Rp. 108.000,-/ semesternya. Kalau anak saya yang duduk di sekolah dasar juga membeli LKS saja. Buku pelajaran tidak di bayar”.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, orang tua siswa tidak lagi membeli buku pelajaran, namun setiap siswa hanya dibebankan membeli LKS setiap bidang studi. Disamping LKS, siswa juga membayar uang pagelaran seni, dan seragam sekolah. Namun di beberapa sekolah, masih dipungut sumbangan senilai Rp.100.000,- untuk operasional sekolah. Sedangkan menurut Nurhayati (guru SD 09 Padang):

“Kami tidak menggunakan buku BOS. Walaupun ada, siswa di beri kebebasan untuk meminjam dan membacanya, karena setiap guru sudah memegang buku pegangannya sendiri-sendiri. Siswa juga dibebankan membeli LKS per bidang studi”.

Mahalnya harga buku yang beredar di kalangan para siswa, merupakan salah satu masalah publik yang memerlukan campur tangan dari pemerintah. Salah satunya adalah dengan dibuatnya sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah mahalnya harga buku. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu perhatian Depdiknas selaku penyelenggara pendidikan, yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan berupa penyediaan buku teks pelajaran layak pakai, yang hak ciptanya telah dimiliki Depdiknas. Buku-buku teks pelajaran tersebut tersedia di situs Depdiknas yang diberi nama **Buku Sekolah Elektronik** yang disingkat **BSE** atau e-book. Jumlah seluruhnya saat ini ada empat ratus tujuh (407) judul buku dan Insya Allah setiap tahunnya akan bertambah³.

Visi dan misi dari program ini adalah menyediakan buku sekolah yang memenuhi standar, bermutu, murah dan mudah diperoleh, serta menurunkan harga buku teks pelajaran yang digunakan oleh para siswa. Selain itu tujuan dari program ini juga merangsang siswa untuk lebih kreatif dengan bantuan teknologi, sehingga tidak gagap teknologi. Sasaran utama dari program BSE ditujukan siswa, guru dan seluruh masyarakat Indonesia⁴.

Penyediaan buku murah yang disediakan oleh Depdiknas sesuai dengan standar nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai buku teks pelajaran. Buku-buku tersebut kemudian diatur dalam Permendiknas No.46 Tahun 2007, Permendiknas No.12 Tahun 2008, Permendiknas No.34 Tahun 2008 dan

³ <http://main.telkomspeedy.com/sambutan-menteri-pendidikan-bse>, diakses tanggal 5 Desember 2009

⁴ <http://kdn.co.id/bse-buku-sekolahelektronik>, diakses tanggal 20 Juli 2010

Permendiknas No.41 Tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Buku teks pelajaran yang dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas kemudian diubah ke dalam buku berformat digital (*e-book*) yang dimasukkan dalam jejaring pendidikan nasional (Jardiknas) yakni <http://bse.depdiknas.go.id>. Buku pelajaran yang ada pada situs ini merupakan buku pelajaran yang ada di sekolah seperti IPA, IPS untuk SD, SMP, SMU dan sederajat. Selain dapat mengakses program BSE, para siswa, guru, maupun masyarakat juga dapat menggandakan, fotokopi, mencetak maupun mengalihmediakan seperti mengunggah dari internet secara gratis.

Data yang diperoleh dari hasil unggahan tersebut bisa dicetak/ print untuk buku teks pelajaran di sekolah, dibaca melalui komputer, ataupun sebagai referensi bahan ajar. Ini sangat memudahkan guru/ siswa dalam mengembangkan materi pelajaran agar tidak terkesan monoton. Hal ini dijelaskan dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2008 pada pasal 2 ayat 2:

Buku teks pelajaran yang dapat digandakan dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat dalam website Departemen oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional

Pada awal peluncurannya, program BSE dapat digunakan oleh masyarakat melalui website <http://bse.depdiknas.go.id>. Untuk dapat mengakses program ini masyarakat memerlukan jaringan internet. Setelah masuk pada website tersebut, masyarakat dapat bebas memilih buku pelajaran yang akan diunggah. Penggunaan media internet untuk menyediakan buku gratis dan berkualitas merupakan salah satu

terobosan dalam dunia pendidikan. Dengan penggunaan teknologi ini, setidaknya dapat mendorong peningkatan pendidikan, karena masyarakat dapat mengakses buku berkualitas dimana pun mereka berada. Sehingga kedepan guru, siswa, ataupun komponen yang ada pada sektor ini, juga dapat mengaplikasikan program ini.

Penggunaan media maya seperti internet dalam dunia pendidikan kini semakin meningkat, baik dikalangan pelajar maupun mahasiswa. Sentuhan teknologi pada dunia pendidikan sudah dilakukan di ITB dalam pengelolaan pustaka digital melalui implementasi pustaka digital di ITB yang bertujuan untuk: menyebarkan karya-karya ilmiah yang dimiliki oleh sivitas akademika ITB secara online, sehingga karya-karya ilmiah ini dapat dimanfaatkan lebih luas lagi oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar⁵. Oleh karena itu penggunaan teknologi seperti buku sekolah elektronik sangat membantu siswa dalam belajar. Selain itu, melalui media elektronik ini, siswa juga dapat menerapkan pembelajaran *active learning* dalam mengembangkan materi pelajaran yang ada di sekolah⁶.

Selain melalui website, program ini juga dapat dinikmati melalui kepingan CD yang berisikan BSE yang sudah digandakan sebelumnya. Terakhir program BSE ini dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk cetak yang sudah diperbanyak oleh penerbit dengan harga terjangkau.

Pelaksanaan program BSE sudah dilakukan di Kota Padang. Ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengadaan edisi cetak BSE untuk tingkat

⁵ Nanan Hasanah, (...) ,Implementasi Perpustakaan Digital di Institute Teknologi Bandung, vol. 6, No. 12, (<http://www.akademik.unsri.ac.id/>, diakses 7 Maret 2010

⁶ Hartono, 2008, Strategi Pembelajaran *Active Learning*, jurnal pendidikan, vol:4 hal:1

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), pendanaannya dari APBN yakni melalui dana BOS buku. Masing-masing siswa yang terdaftar sebagai penerima BOS mendapatkan Rp 575.000 setahun, tetapi untuk biaya buku hanya Rp 12.000/siswa⁷.

Penggandaan BSE di Kota Padang sudah dilakukan oleh grup Padang Ekspres. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur, guru-guru di sekolah tidak perlu meragukan mutu buku ini. "Sekolah di himbau mendukung program ini sehingga pendidikan murah dan bermutu sesuai yang diinginkan pemerintah dapat diwujudkan secepatnya. Dari Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku, kegiatan memperdagangkan BSE sesuai harga eceran tertinggi (HET) sudah direstui"⁸. Harga BSE tersebut berada di kisaran Rp 7.000,- hingga Rp 15.000,-.

Selain menetapkan harga jual dari BSE, program ini juga terus berjalan dengan dialokasikannya dana BOS untuk membeli BSE. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mensukseskan program BSE. Setidaknya pemerintah memberikan dana untuk menyediakan buku secara gratis kepada para siswa. Sekolah yang memperoleh dana BOS, diwajibkan membeli BSE sebagai buku teks pelajaran bagi para siswanya.

Untuk mengetahui implementasi program BSE dalam bentuk digital pada siswa sekolah dasar, maka peneliti bersama tim yang tergabung dalam Program

⁷ Hasil wawancara dengan Nurwasni (staf pengendalian mutu Dinas Pendidikan Kota Padang) tanggal 9 Januari 2010

⁸ <http://www.padang-today.com>, Peluncuran Buku Cetak BSE Padang Ekspres, diakses tanggal 14 Januari 2010

Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKMM) bekerja sama dengan Dirjen Dikti Jakarta, mengadakan sebuah poling kepada sejumlah siswa sekolah dasar di Kota Padang. Berdasarkan hasil *pre test* yang dilakukan pada sejumlah siswa sekolah dasar di Kota Padang (SDN 03 Kampung Dalam, SDN 09 Koto Tinggi, SDN 27 Ulu Gadut) tentang sejauh mana mereka mengenal dan dapat mengoperasikan komputer dan internet maupun program BSE, diperoleh data sebagai berikut⁹:

Tabel 1. 1 Hasil Pre Test Siswa SD Terhadap Kemampuan Komputer

No	Pertanyaan	Sudah	Belum
1	Apakah adik-adik sudah mengenal komputer	75%	25%
2	Apakah adik-adik sudah pernah menggunakan komputer	71%	29%
3	Apakah adik-adik sudah pernah menggunakan internet	25%	75%
4	Apakah adik-adik tahu program BSE	4%	96%
5	Apakah Bapak/Ibu Guru di sekolah sudah memperkenalkan program BSE	0%	100%

Sumber : Laporan PKMM, 2009

Berdasarkan data dari tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa, para siswa umumnya sudah mengenal media elektronik seperti komputer. Sekitar 71% siswa sudah pernah menggunakan komputer baik di rumah maupun di warung internet (warnet). Untuk menggunakan program BSE, diperlukan pengetahuan siswa tentang sejauh mana mereka mengenal internet, apakah sudah pernah menggunakan internet, dan frekuensi

⁹ Eko Permana, dkk, 2009, "Pelatihan Program *E-Book* Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pada Sekolah Dasar Di Kota Padang" Laporan Akhir Program Kretifitas Mahasiswa (PKM) Bidang pengabdian Masyarakat, Padang: Universitas Andalas, hal: 13

siswa mengoperasikan internet. Dari jawaban *pre test* yang dilakukan, 25% sudah bisa mengoperasikan internet. Jika dikaji lebih jauh, siswa yang sudah bisa menggunakan internet adalah siswa yang berada di pusat kota atau dekat dengan kampus, 75% siswa lainnya belum pernah menggunakan internet dengan alasan keuangan ataupun akses yang minim terhadap internet di daerah tempat mereka tinggal. Dengan adanya kemampuan siswa menggunakan media komputer dan internet, maka akan mempermudah siswa menggunakan fasilitas BSE dalam bentuk digital.

Program BSE yang telah diluncurkan oleh Depdiknas ternyata kurang populer dikalangan siswa Kota Padang. Setidaknya dari data, 96% siswa belum mengenal program ini. Minimnya pengetahuan siswa tentang program BSE di sekolahnya masing-masing lebih pada sosialisasi yang dilakukan, baik melalui guru, Dinas, maupun pejabat terkait. Sosialisasi ini sangat penting dalam sebuah kebijakan publik. Jika sebuah kebijakan/ program tidak dilakukan secara optimal, maka *outcomes* dari kebijakan tersebut juga tidak sesuai dengan harapan.

Padahal jika melihat tujuan program BSE ini, salah satunya adalah merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, tentu saja para siswa sudah terbiasa dan trampil menggunakan teknologi informasi (TI), seperti mengakses internet, disamping mereka memiliki buku pelajaran dalam bentuk *soft copy* dan bisa di-print (cetak) sesuai keinginan. Namun kenyataan di lapangan, terjadi dilema dalam pengadaan BSE ini yang berujung persoalan biaya dan kepraktisan.

Hal yang perlu peneliti garis bawahi, program *e-book* tersedia untuk siswa SD, namun siswa SD justru yang cenderung terlupakan. SD merupakan tingkat sekolah yang paling minim fasilitas komputer/internet. Tuntutan perkembangan TI, menuntut penguasaan TI semenjak dini, sehingga transfer teknologi sejak dini pada siswa sekolah dasar sangat diperlukan. Selain itu penggunaan buku sekolah elektronik dalam bentuk cetak juga menjadi perhatian peneliti. Apakah penyediaan buku murah ini sudah dilakukan oleh pihak sekolah, apakah siswa sudah diwajibkan menggunakan buku ini atau masih dibebankan untuk membeli buku lain di luar sekolah, serta bagaimana implementasi dari program ini terutama di sekolah dasar di Kota Padang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan penelitian terkait implementasi program BSE SD di Kota Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah: bagaimana implementasi program buku sekolah elektronik SD di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menjelaskan tentang implementasi program buku sekolah elektronik SD di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, sehingga dapat memperkuat teori-teori tentang implementasi kebijakan.
 - b. Menambah referensi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan publik yang diturunkan dalam sebuah program. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dihasilkan.
3. Secara sosial
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bahwa sebuah kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
4. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bisa diajukan acuan dalam membuat sebuah regulasi di instansi yang bersangkutan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti melihat beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang peneliti ambil dalam melakukan penelitian. Penelitian yang senada dengan penelitian ini pernah diangkat dengan judul *"Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik (Studi Deskriptif Kualitatif Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik Di Kalangan Guru SMA Negeri 4 Surakarta)"*¹⁰.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Paulina ini, lebih melihat proses keputusan inovasi yang diambil oleh guru SMA Negeri 4 Surakarta dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak program BSE di sekolah sebagai bahan ajar pada peserta didik. Secara operasional, studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan penggunaan buku sekolah elektronik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Penelitian yang serupa dengan tema peneliti, pernah dilakukan pula oleh Muhammad Ilham¹¹. Skripsinya berjudul *"Peranan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dalam Bidang Studi Pendidikan Agama*

¹⁰ Paulina Yoga Widiastuti, 2009, Skripsi, "Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik (Studi Deskriptif Kualitatif Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik di Kalangan Guru SMA Negeri 4 Surakarta) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹¹ Muhamad Ilham, 2008, Skripsi, "Peranan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Jetak Probolinggo", Surabaya : IAIN Sunan Ampel

Islam Di SDN Jetak Probolinggo". Secara operasional, studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis fenomena yang terjadi, yakni pengaruh kehadiran program BSE pada peningkatan prestasi siswa SD pada mata pelajaran PAI.

Sebagai penunjang pendidikan, buku merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Depdiknas meluncurkan program yang dinamakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang menyediakan buku sekolah gratis yang dapat diunduh melalui situs Depdiknas yaitu berupa buku elektronik (*e-book*). Ada dua fasilitas yang disediakan dalam situs tersebut, yakni unggah dan baca online, masyarakat luas dapat mengakses secara gratis buku dalam bentuk elektronik atau *e-book*. Guru, murid, pemerintah daerah, ataupun pengusaha diperkenankan untuk mengunduh, mengkopi, mencetak, menggandakan, bahkan sampai memperdagangkannya.

Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang peneliti lakukan ini melihat bagaimana implementasi dari penyelenggaraan program buku sekolah elektronik pada sekolah dasar di Kota Padang. Implementasi program ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun sejak peluncurannya pertama kali pada tanggal 20 Agustus 2008 oleh Mendiknas.

Sebuah kebijakan atau program dalam implementasinya dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek yang peneliti teliti yaitu bagaimana implementasi program buku sekolah elektronik SD di Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi Brian W. Hogwood dan A. Gunn. Agar lebih sistematis dan jelas, maka perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Lokasi	Teori	Metode Penelitian	Hasil
1	Paulina Yoga Widiastuti	Proses keputusan inovasi program buku sekolah elektronik (studi deskriptif kualitatif proses keputusan inovasi program buku sekolah elektronik di kalangan guru SMA Negeri 4 Surakarta)	SMA Negeri 4 Surakarta	Keputusan	Kualitatif	Keputusan guru-guru untuk tidak mengadopsi BSE karena minimnya penguasaan internet dan komputer.
2	Muhammad Ilham	Peranan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SDN Jetak Probolinggo	SDN Jetak Probolinggo	Uji Product Moment	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Buku Sekolah Elektronik (BSE) meningkatkan prestasi siswa di SDN Probolinggo khususnya pada bidang pendidikan studi Pendidikan Agama Islam.
3	Fathiah L. Munaf	Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik di Kota Padang	Dinas Pendidikan Kota Padang SDN 03 Kampung Dalam SDN Percobaan SDN 15 Ulu Gaduf	Brian W. Hoogwood dan A. Gunn	Kualitatif	Pelaksanaan BSE SD di Kota Padang dalam bentuk (virtual dan cetak). Implementasi BSE ini mengalami kendala pada anggaran yang masih minim untuk menyediakan buku, karena dana BOS Buku yang diberikan pemerintah hanya Rp. 15.000/tahun. Sedangkan sekolah yang menggunakan internet untuk mengajarkan BSE secara langsung adalah SDN Percobaan yang menutupi anggaran dengan meminta iuran SPP pada masing-masing siswa.

2.2 Teori yang Digunakan

2.2.1 Kebijakan Publik

Banyak permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, dan permasalahan tersebut dapat teratasi jika pemerintah ikut andil di dalamnya dengan cara membuat sebuah regulasi yang bersifat mengikat. Kebijakan publik sangat penting bagi masyarakat, ketika sebuah permasalahan sudah sangat mendesak. Kebijakan publik juga sangat dibutuhkan pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa mengenal status maupun ras. Pendidikan suatu bangsa juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik. Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah¹². Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda¹³.

James E. Anderson, kebijakan adalah ketetapan yang ditetapkan oleh badan pemerintah. Sedangkan Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk

¹² Harbani Pasolong, 2008, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfa Beta, hal:38

¹³ Rjant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal:3

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu¹⁴.

Elau & Prewitt mengartikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut¹⁵. Sedangkan Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah¹⁶.

Dari definisi kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara dan sasaran utama dari setiap kebijakan yang dibuat adalah warga negara. Jadi kebijakan publik bukan keputusan dari orang/ atas nama pribadi. Kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian dari beberapa kegiatan yang saling berkaitan.

Untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang baik, melalui rangkaian proses formulasi kebijakan. Antara satu tahapan dengan tahapan selanjutnya memiliki keterkaitan. Pada pelaksanaannya di lapangan, sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil jika kebijakan yang dihasilkan baik, dan implementasi dari kebijakan itu sendiri baik.

¹⁴ *Ibid*, hal: 15

¹⁵ Tim Simpul Demokrasi, 2006, Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik, Malang: PlaCID's Averroes Press, hal:3

¹⁶ William N. Dunn, 2003, Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal:132

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Tahap kebijakan yang mengikuti rekomendasi kebijakan, setelah diputuskan/dibuatnya kebijakan berdasarkan rekomendasi kebijakan adalah implementasi kebijakan¹⁷. Implementasi kebijakan merupakan proses yang paling sulit dalam pembuatan kebijakan, karena ada perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Seringkali sebuah kebijakan gagal akibat implementasi yang tidak sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan.

Ada banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada¹⁸. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan¹⁹.

Sedangkan dalam kamus Webster, implelementasi kebijakan diartikan : *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbul dampak /akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (UU,PP,dekrit presiden, dll)²⁰.

¹⁷ Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik Proses Dan Analisis, Jakarta: Intermedia, hal: 95

¹⁸ Yeremias T. Keban, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media, hal:66

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan Edisi Kedua Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hal :64

²⁰ *Ibid.*, hal:63

Salah satu model teori implementasi adalah model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978)²¹. Model ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai "*the top down approach*". Menurut Pressman dan Wildavsky pendekatan *top down* ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol tahapan dalam sebuah sistem; dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh "hipotesis kebijakan"²².

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Beberapa kendala/hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan ini bisa berupa fisik maupun politis.
2. Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam pengertian bahwa kerap kali muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan bisa tidak berhasil mencapai tujuan karena waktu yang pendek, minimnya penyediaan sarana maupun anggaran.

²¹ Nugroho D, *loc.cit.*, hal:16

²² Wayne Parsons, 2008, *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal :468

3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Kedua syarat diatas harus terpenuhi, disatu sisi harus ada jaminan tidak terdapat kendala pada sumber yang diperlukan, dan dipihak lain pada setiap tahapan proses implementasi perpaduan sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan "sebab-akibat" semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat tercapai. Semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), walaupun melibatkan badan/instansi lainnya harus pada tingkat minimal, baik jumlah maupun tingkat kepentingannya. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif, apalagi jika hubungannya adalah hubungan saling ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi.

Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi.

8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas dan jelas yang dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mencapai tujuan yang telah dibuat, masih dimungkinkan untuk dirinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan setiap pihak yang terlibat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik.
10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target.

Program buku sekolah elektronik merupakan salah satu kebijakan pusat yang dilaksanakan di daerah. Program ini juga bersentuhan dengan sektor pendidikan, yang menjadi kewenangan pusat, sehingga program ini bersifat *top down* dalam

pelaksanaannya, dimana hanya ada pelaksana tunggal yakni departemen pendidikan. Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan sebelumnya, maka peneliti menggunakan teori implementasi menurut Hogwood dan Gunn. Teori ini menjelaskan secara linier dari kebijakan publik yang dihasilkan, siapa saja aktor yang terlibat dalam kebijakan.

Berdasarkan survei awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya, peneliti memilih 5 dari 10 syarat implementasi menurut Hogwood dan Gunn. Ini memudahkan peneliti dalam menganalisis sampai sejauh mana keberhasilan dari program peneliti teliti. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.* Menurut Hogwood, implementasi tidak akan berhasil biasanya disebabkan faktor eksternal yang tidak dikehendaki. Ini disebabkan oleh pelaksananya yang buruk, pergantian kepemimpinan, atau bersifat politis. Implementasi program BSE sangat tergantung dari implementor (mendiknas, kepala dinas, kepala sekolah) yang merupakan implementor langsung dari program ini dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pergantian pimpinan pada instansi pelaksana program BSE. Asumsinya pergantian pimpinan terkadang merubah kebijakan yang sudah berjalan, khususnya pada sektor pendidikan. Pergantian pimpinan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

Pola kepemimpinan ini juga sangat berkaitan dengan poin no 10 yaitu bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Dimana kepatuhan bawahan pada

implementor utama (kepatuhan kepala sekolah pada kepala dinas, ataupun guru-guru pada kepala sekolah dalam implementasi program BSE). Keterkaitan kedua poin ini yang peneliti gabungkan menjadi satu bahasan.

2. *Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.* Poin ke 2 dan ke 3 syarat implementasi Hogwood dan Gunn, pada dasarnya saling berkaitan. Poin ke 3 lebih menegaskan ketersediaan sumber daya dan adanya jaminan faktor eksternal dalam implementasi. Keterkaitan kedua poin ini, peneliti gabung dalam satu bahasan, yaitu pada poin kedua. Ini dilakukan berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, tentang sumber daya maupun faktor eksternal pada implementasi BSE. Sumber daya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana) serta faktor eksternal (pergantian pimpinan), menjawab persyaratan ketiga teori ini.
3. *Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.* Hubungan ketergantungan pada implementasi BSE berkaitan dengan mata rantai pelaksana program. Hanya ada satu badan tunggal pelaksana program yakni Depdiknas, maka keterlibatan instansi (yang mengakibatkan kompleksitas pelaksanaan program/ kepentingan) lain dibatasi. Sehingga pada poin 5, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi tidak perlu diteliti. Poin 5 ini lebih menjelaskan keterlibatan banyak pihak/ mata rantai kausalitas dalam implementasi.

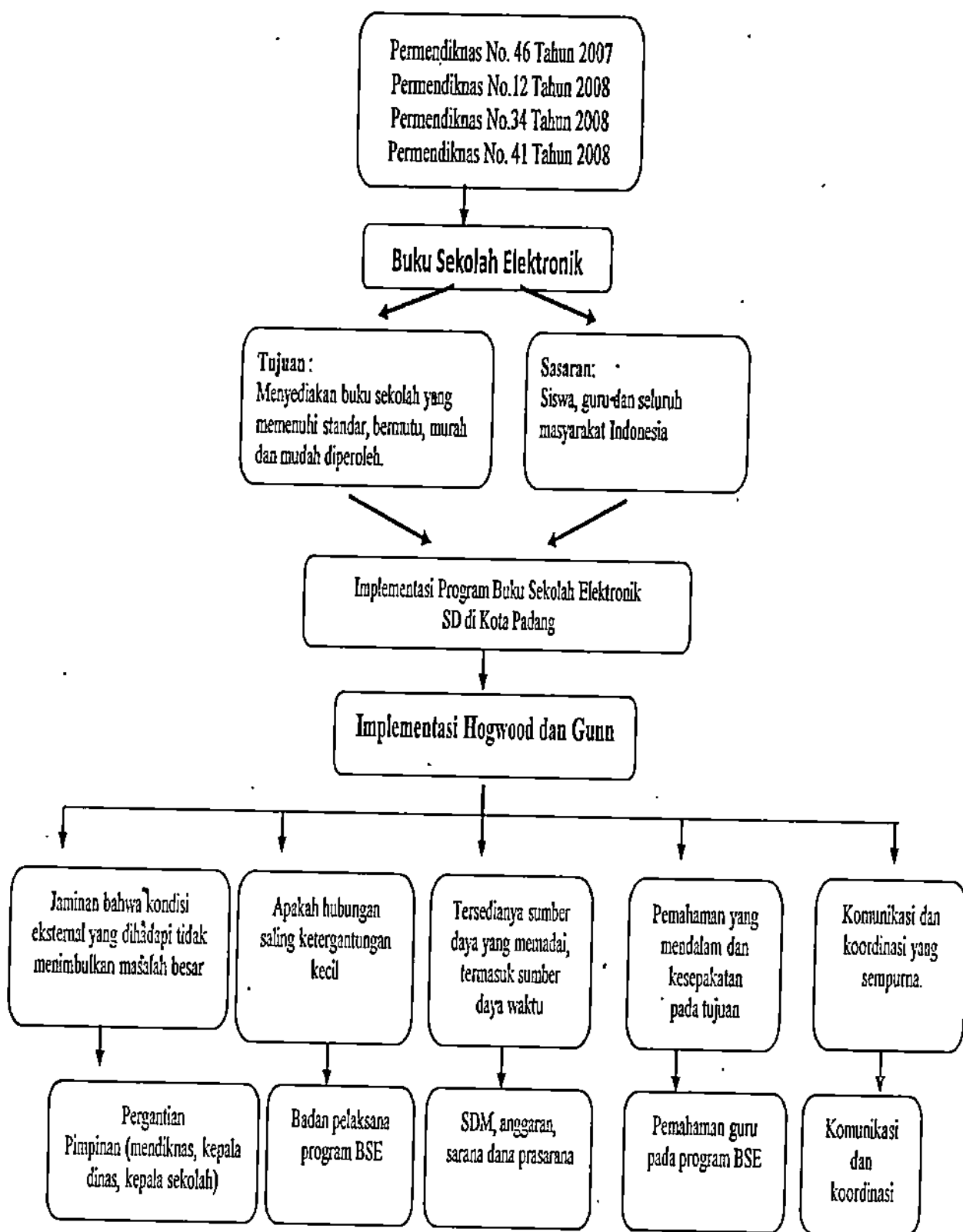
Inilah yang menyebabkan peneliti tidak menggunakan poin 5 ini dalam penelitian program BSE. Adanya pembatasan badan/instansi lain dalam program ini, membuat mata rantai atau ketergantungan implementasi program ini menjadi kecil.

4. *Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.* Pemahaman implementor pada kebijakan/program yang akan dilaksanakan menjadi perhatian utama peneliti. Apakah implementor benar-benar memahami akan program yang dilaksanakan atau tidak. Pemahaman yang mendalam ini dapat dilihat pada prosedur pelaksanaan program yang sudah diatur sebelumnya.

Poin ini juga sangat berkaitan dengan poin ke 8, yakni tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kepahaman implementor dapat dilihat dari prosedur yang telah buat dan dilaksanakan di lapangan. Sehingga poin ke 8 ini peneliti satukan dalam bahasan poin pemahaman implementor yang *include* di dalamnya tentang aturan yang mengatur program BSE ini lebih mendalam.

5. *Komunikasi dan koordinasi yang Sempurna.* Komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik, kebijakan bisa tidak berhasil. Begitupun dengan komunikasi, kesalahan informasi maupun komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan akan berdampak langsung pada kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat pola komunikasi dan koordinasi yang digunakan oleh implementor pada implementasi program BSE.

2.3 Skema Pemikiran



2.4 Daftar Istilah

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan. Pada tahapan ini, kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* dilaksanakan di lapangan. Pelaksanaan dari kebijakan ini akan melibatkan banyak aktor yang satu sama lain memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka tidak heran pada tahap ini lah, sebuah kebijakan dapat diukur. Apakah berhasil atau gagal dalam implementasinya. Untuk kebijakan publik, implementasi setiap program atau kebijakan akan melibatkan badan-badan pemerintah. Sebuah kebijakan dapat melibatkan satu atau banyak badan pemerintah.

Definisi dari implementasi kebijakan banyak di tulis oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah James Anderson, yang menegaskan implementasi dalam pembuatan kebijakan lebih pada siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan, apa dampak dari isi kebijakan²³.

2. BSE

Buku sekolah elektronik (BSE) merupakan salah satu program pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berbasis TI. Melalui program ini, pemerintah menyediakan buku pelajaran dengan harga murah dengan membeli hak cipta dari judul buku dari penerbit ataupun penulis buku yang dianggap layak sebagai buku pegangan para siswa. Siswa maupun pihak sekolah dapat mengakses

²³ Agus Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal:88

program ini melalui situs <http://depdiknas.bse.go.id>. Melalui situs ini, semua pihak dapat mengunduh buku pelajaran yang ada, dan dapat pula dialihmediakan melalui fotokopi, cetak CD dan lainnya. Program ini diluncurkan pada tanggal 28 Agustus 2008.

Tujuan dari program ini adalah meringankan beban orang tua yang harus membayar buku pelajaran yang semakin mahal. Disamping itu, program ini juga melatih para siswa maupun pihak sekolah menggunakan fasilitas komputer maupun internet yang berbasis TI. Sehingga kedepannya, siswa tidak lagi gagap teknologi.

Program BSE kemudian berkembang seiring banyaknya kendala yang terjadi di lapangan seperti tidak semua siswa/sekolah memiliki komputer dan internet dengan menyediakan program BSE dalam bentuk kepingan CD yang dapat dicetak. Selanjutnya dengan bantuan oprasional BOS Buku, sekolah mendapatkan dana yang sudah *include* pada dana BOS untuk dibelikan buku sekolah elektronik. Penyediaan buku pelajaran ini terus bertambah setiap tahunnya. Jika pada tahun 2008, Depdiknas menyediakan 407 buah buku, tahun ini kurang lebih sudah mencapai 800 buah judul buku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan & Disain Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban pertanyaan penelitian²⁴. Pendekatan penelitian diperlukan untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga mempunyai disain penelitian sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara induksi²⁵.

Pendekatan yang peneliti pakai dalam melihat implementasi program buku sekolah elektronik SD di Kota Padang adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat dengan melihat atau mengemukakan gejala-gejala secara lengkap yang sesuai dengan aspek yang peneliti teliti, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam akurasi data.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokus dari penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, khususnya pada sekolah dasar dan Dinas Pendidikan Kota

²⁴ Afrizal, 2005, Metode Penelitian Sosiologi II, Padang: Fisip, hal:6

²⁵ Lexy J Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya: Bandung, hal: 3

Padang. Alasan peneliti memilih sekolah dasar sebagai objek penelitian peneliti dikarenakan program *e-book* tersedia untuk siswa SD, namun siswa SD justru yang cenderung terlupakan. SD merupakan tingkat sekolah yang paling minim fasilitas komputer/internet. Sehingga sedikit sekali siswa SD dapat menikmati program BSE dalam bentuk digital. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Padang, peneliti anggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas pendidikan di Kota Padang, dan memiliki informasi yang sangat diperlukan.

Sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian ini sebanyak 3 sekolah, yaitu SDN 03 Kampung Dalam, SDN 15 Ulu Gadut dan SDN Percobaan Ujung Gurun. Pemilihan sekolah sebagai objek penelitian ini, peneliti bagi menjadi dua, yakni sekolah di pusat kota yang memiliki fasilitas cukup lengkap, dan sekolah pinggir kota yang kurang memiliki fasilitas. Ini dilakukan untuk membandingkan implementasi program BSE pada masing-masing sekolah berdasarkan fasilitas yang dimiliki.

3.3 Peranan Peneliti

Peranan peneliti dalam penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai instrumen utama/ peneliti. Peneliti dituntut untuk mampu menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini membutuhkan sebuah ketelitian dan kemampuan peneliti untuk mendeskripsikan data yang masih bersifat mentah, menjadi sebuah laporan yang dapat lebih di mengerti dan dipahami.

Peneliti memulai penelitian dengan membuat surat izin penelitian di kantor kesbangpol, Air Pacah Padang pada tanggal 10 Maret 2010. Untuk membuat surat ini,

peneliti hanya membutuhkan satu hari saja. Setelah mengurus surat di kesbangpol, peneliti langsung melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kota Padang. Namun peneliti tidak dapat langsung melakukan penelitian, karena harus membuat surat penelitian juga di dinas ini. Tanggal 18 Maret 2010, surat izin penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Padang baru bisa peneliti peroleh. Pukul 11.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas. Wawancara berlangsung selama satu jam. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kasi pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Padang pada pukul 13.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Dinas, dan Kasi Dinas Pendidikan Kota Padang, peneliti meminta informasi tambahan beberapa profil Dinas Pendidikan di bagian humas.

Tanggal 23 Maret 2010, peneliti baru melakukan penelitian di SDN 03 Kampung Dalam. Peneliti bertemu dengan staf tata usaha, kemudian langsung bertemu dengan Ibu Ratnidar selaku kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah pukul 08.40 s.d 09.15 WIB. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan staf guru, komite sekolah dan siswa. Proses wawancara lebih mudah dilakukan, karena peneliti melakukan wawancara ketika jam istirahat berlangsung. Proses wawancara informan ini berlangsung hingga pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya tanggal 24 Maret 2010, peneliti melakukan wawancara di SDN 03 Alai. Namun karena kepala sekolah berhalangan, peneliti diminta untuk mengundurkan penelitian hingga minggu depan. Dan setelah peneliti tunggu sampai dua minggu pihak sekolah terutama kepala sekolah sering menolak untuk dilakukan wawancara dengan alasan sibuk. Setelah tiga minggu, tepatnya tanggal 8 April 2010,

peneliti juga tidak dapat melakukan wawancara dengan kepala sekolah dengan alasan kepala sekolah yang berbelit-belit dan tidak kooperatif, sehingga peneliti memutuskan untuk membatalkan penelitian di SDN 03 Alai.

Peneliti kemudian mencari data dan melakukan wawancara di SDN percobaan Ujung Gurun pada tanggal 23 Maret 2010. Ketika pertama kali datang, peneliti langsung menemui kepala sekolah Bapak Saparman Nur, karena letak ruang kepala sekolah berdekatan dengan pintu masuk sekolah. Setelah diajak berkeliling memperlihatkan fasilitas sekolah dan sedikit penjelasan, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru yang ada. Penerimaan sekolah yang baik dalam memberikan data yang dibutuhkan, memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Terakhir peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data di SDN 15 Ulu Gadut pada tanggal 24 Maret 2010. Pada awalnya peneliti bertemu dengan Bapak Aan selaku patugas tata usaha yang berada di ruang kepala sekolah. Kemudian peneliti bertemu dengan kepala sekolah Ibu Ernawati di perpustakaan. Proses pengambilan data dilakukan selama empat hari karena ada beberapa data yang baru diberikan. Tanggal 28 Maret peneliti memperoleh semua data yang dibutuhkan. Setelah semua bahan penelitian peneliti rasa cukup, peneliti kemudian mengolah data-data yang ada dalam bentuk bahan sekunder sebagai bahan pendukung pada skripsi yang peneliti buat.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian²⁶. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu peneliti menunjuk langsung orang-orang yang peneliti anggap mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian ini²⁷.

Informan bisa dibagi menjadi dua, informan kunci (*key informan*) dan informan biasa²⁸. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan pada asumsi bahwa informan tersebut mempunyai informasi yang dibutuhkan karena berkaitan dengan pelaksanaan program buku sekolah elektronik, khususnya pada pendidikan tingkat dasar di Kota Padang.

1. Informan kunci adalah informan berdasarkan pemegang otoritas pelaksana pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (mengeluarkan peraturan dari setiap program/ kebijakan Depdiknas yang diteruskan ke setiap sekolah, termasuk program BSE), Kepala Sekolah. Mereka dijadikan informan kunci dengan pertimbangan, (1) orang yang bersangkutan memiliki otoritas dalam pelaksanaan program BSE, (2) orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang peneliti teliti.
2. Informan biasa adalah informan sebagai pelaksana program BSE dan sasaran dari program : staf guru, komite sekolah, serta siswa. Siswa yang peneliti wawancarai adalah siswa kelas 5 atau 6 yang merupakan peringkat 5 besar di

²⁶ *Ibid.*, hal: 21

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Koentjaaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1976, hal:164

kelas, orang tua siswa yang peneliti wawancarai merupakan orang tua dari siswa yang peneliti wawancarai di sekolah.

Informan yang peneliti libatkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan	Institusi
1.	Drs. H. M.Nur Amin, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
2.	Dra. Laila Fatma	Kepala Seksi Pembinaan SD
3.	Ratnidar, S.Pd	Kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam
4.	Leni, A. Md	Guru SDN 03 Kampung Dalam
5	Efendi, A. Md	Dewan komite sekaligus guru olah raga
6	Aldi Syah putra	Siswa SDN 03 Kampung Dalam
7	Syahrudin Putra	Orang tua siswa SDN 03 Kampung Dalam
8	Ernawati, S.Pd	Kepala sekolah SDN 15 Ulu Gadut
9	Dra. Sumarni	Guru SDN 15 Ulu Gadut
10	Violita Andriani	Siswa SDN 15 Ulu Gadut
11	Resta Anjelia	Orang tua siswa SDN 15 Ulu Gadut
12	Saparman Nur, S. Pd	Kepala sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun
13	Marnis Sulin, S. Pd	Guru SDN Percobaan Ujung Gurun
14	Utami Budi Fadilah	Siswa SDN Percobaan Ujung Gurun
15	Ibu Eva	Orang tua siswa SDN Percobaan Ujung Gurun
16	-	Kepala Sekolah SDN 03 Alai, penelitian di sekolah ini dibatalkan karena kurangnya partisipasi kepala sekolah dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti dengan berbagai alasan.

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Dapat berupa kelompok, individu, organisasi, benda, wilayah dan waktu

tertentu sesuai dengan fokus permasalahan²⁹. Unit analisis dalam sebuah penelitian sangat berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain, objek yang diteliti ditentukan kriterianya agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang ada. Untuk penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga yaitu Dinas Pendidikan Kota Padang dan sekolah, yakni SDN 03 Kampung Dalam, SDN Percobaan Ujung Gurun dan SDN 15 Ulu Gadut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan data-data pendukung untuk menguatkan sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan sebagai pendukung ini, harus dipilih dengan teknik yang tepat, sehingga diperoleh data yang valid dan realibel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber, yang diperoleh melalui wawancara mengenai masalah penelitian³⁰. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder diambil dari dokumen berupa literatur buku, maupun laporan sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara (*interview*), yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara dan orang yang akan

²⁹ Lexy Moleong, *op.cit*, hal:49

³⁰ Lexy Moleong, *Ibid.*, hal :113

diwawancarai. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat secara langsung dalam program buku sekolah elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Seksi Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala Sekolah SDN 03 Kampung Dalam, Kepala Sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun, Kepala Sekolah SDN 15 Ulu Gadut, Komite Sekolah SDN 03 Kampung Dalam.

2. Pengamatan intensif (observasi).

Teknik observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan situasi sosial serta konteks di mana kegiatan itu terjadi³¹.

Observasi yang digunakan adalah *participant as observer* yaitu peneliti memberitahukan maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti³². Teknik observasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data lapangan dengan cara langsung ke lokasi lapangan. Melalui observasi peneliti telah melihat secara langsung penggunaan buku sekolah elektronik dalam bentuk cetak yang digunakan oleh siswa di sekolah masing-masing, dan penggunaan

³¹ Nasution, 1998, Metode Penelitian Naturalistik, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, hal: 59

³² Ritzer, 1992, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers, hal: 74

BSE dalam bentuk virtual di lab. komputer SDN Percobaan Ujung Gurun. Observasi juga peneliti lakukan melalui artikel yang peneliti peroleh dari internet, untuk melihat perkembangan implementasi BSE di sekolah pada pergantian pimpinan badan pelaksana BSE. Data tersebut peneliti jadikan bahan acuan dan refrensi dalam penulisan skripsi.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti secara langsung bagaimana pelaksanaan program buku sekolah elektronik pada masing-masing sekolah yang dijadikan objek penelitian, yaitu SDN 03 Kampung Dalam, SDN Percobaan Ujung Gurun dan SDN 15 Ulu Gadut.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagai informasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan terkait dengan pelaksanaan program buku sekolah elektronik SD di Kota Padang. Dokumen yang peneliti gunakan berupa Permendiknas No. 46 Tahun 2007, Permendiknas No.12 Tahun 2008, Permendiknas No.34 Tahun 2008, Permendiknas No. 41 Tahun 2008, profil Dinas Pendidikan Kota Padang, surat edaran Dinas Pendidikan No: 4138/420.DP/KMKP/2008, laporan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana BOS Buku Tahun 2008-2008 SDN 15 Ulu Gadut.

3.7 Uji Pembuktian / Triangulasi Data

Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi berarti segitiga. Triangulasi dapat berarti adanya

informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda³³. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data agar validitas dan reliabilitas data yang diperoleh tercapai.

Teknik triangulasi yang peneliti pakai disini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mencoba membandingkan hasil wawancara dengan para informan yakni Dinas Pendidikan Kota Padang dan aparaturnya, dengan pihak sekolah SDN 03 Kampung Dalam, SDN Percobaan Ujung Gurun serta SDN 15 Ulu Gadut.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan³⁴. Dalam penelitian ini data yang di dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang di dapat dari data-data dokumen. Untuk kedua jenis data tersebut, peneliti tetap menganalisisnya secara deskriptif. Data kuantitatif yang peneliti peroleh menjadi data pendukung deskripsi kualitatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan setiap data yang peneliti peroleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang ada sehingga diperoleh gambaran secara jelas untuk kemudian ditarik kesimpulan dan rekomendasi penelitian berikutnya.

³³ Afrizal, *op.cit.*, hal:62

³⁴ Masri Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES hal:263

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Program Buku Sekolah Elektronik

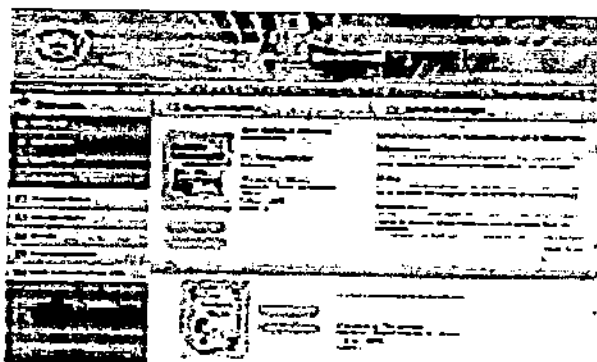
Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah satu program pemerintah melalui Depdiknas dalam rangka menyediakan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan, bermutu dan murah. Hak cipta buku teks pelajaran itu sudah dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional, disajikan dalam bentuk format PDF dengan nama Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan tersedia di situs <http://bse.depdiknas.go.id>.

Pada program ini, Depdiknas telah menyediakan 407 judul buku dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Buku-buku yang disediakan sesuai dengan standar nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai buku teks pelajaran melalui: Permendiknas No. 12 Tahun 2008, Permendiknas No. 34 Tahun 2008, Permendinas No. 41 Tahun 2008. Buku-buku pelajaran yang ada pada situs ini merupakan buku pelajaran yang ada di sekolah seperti IPA, IPS untuk sekolah dasar, SMP, SMU dan sederajat.

Pada awalnya program ini hanya berbentuk digital, dimana siswa, guru maupun masyarakat umum dapat mengakses program ini melalui inrernet. Selain dapat di dapat baca secara online, pengunjung *website* juga dapat menggandakan, fotokopi, mencetak maupun mengalihmediakan seperti mengunggah dari internet. Namun karena banyaknya keluhan seperti tidak semua siswa dapat menggunakan internet, tidak semua sekolah memiliki perangkat komputer dan internet untuk menggunakan program ini, serta mahalnya biaya untuk mencetak program ini, maka

Depdiknas kemudian membuat program ini dalam bentuk CD BSE yang kemudian dibagikan pada setiap sekolah.

Perkembangan selanjutnya adalah setelah menjadi kepingan CD, untuk mencetak buku ini dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana untuk pengadaan buku sekolah elektronik yang *include* pada dana bantuan BOS. Pelaksanaan program BSE dimulai pada tanggal 20 Agustus 2008, dan terbilang masih baru dan masih banyak kekurangan, kedepannya program ini akan terus mengalami perubahan kearah yang lebih baik lagi³⁵.



Gambar 4.1 Tampilan Program BSE di Virtual

Cara Kerja BSE

Program buku sekolah elektronik dapat diakses oleh siswa, guru maupun masyarakat umum melalui situs jejaring pendidikan nasional (Jardiknas) yaitu <http://bse.depdiknas.go.id>. Atau siswa juga dapat mengakses program ini melalui <http://www.pusbuk.or.id>, dan <http://www.sibi.or.id>. Setelah masuk pada salah satu

³⁵ *Op.cit.*,.. <http://kdn.co.id/bse-buku-sekolah-elektronik>, diakses tanggal 20 Juli 2010

situs tersebut, pengunjung dapat mengunggah buku pelajaran dengan memilih buku yang ada pada situs sesuai dengan mata pelajaran yang disediakan, serta tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/ sederajat.

Untuk mengunggah buku-buku tersebut, dapat menggunakan aplikasi *Internet Download Manager*, langkah selanjutnya adalah melakukan *Extract File* menggunakan WinZip/WinRar buka file dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader. Selain dapat diakses secara gratis, program buku sekolah elektronik ini juga memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pengganda dan/atau penjual berkewarganegaraan Indonesia atau berbadan hukum di wilayah Indonesia;
2. Mencantumkan identitas diri pada halaman prelin bagi buku-buku yang diperdagangkan/disebarluaskan;
3. Spesifikasi buku teks pelajaran hasil penggandaan untuk diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas.
4. Harga Jual buku teks pelajaran yang dapat digandakan untuk diperdagangkan tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas.
5. Buku teks pelajaran yang digandakan untuk diperdagangkan harus mencantumkan harga jual buku pada kulit sisi luar buku bagian belakang.
6. Pengguna wajib mentaati butir-butir kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Buku sekolah elektronik yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Depdiknas, dapat dicetak, dijual/diperdagangkan. Untuk memperdagangkan buku ini, juga diatur dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2008. Pada pasal 2 ayat 1 sebutkan:

Buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen dapat digandakan dan/atau diperdagangkan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Selain itu, harga jual dari buku ini sendiri juga diatur dalam Permendiknas No.2 Tahun 2008 Tentang Buku. Ayat yang menjelaskan Permendiknas tentang buku yang peneliti gunakan pasal 8, yang berbunyi:

Ayat 2

Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah yang membeli hak cipta buku.

Ayat 3

Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai di tangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan setinggi-tingginya 15% dari taksiran biaya wajar

Dengan dikeluarkannya program BSE ini dari pemerintah, maka pihak sekolah tidak lagi diperbolehkan menjual buku pegangan siswa dari para penerbit. Kalaupun menjual buku pelajaran, itu merupakan program BSE yang sudah dibukukan dengan harga yang sesuai dengan Permendiknas No. 2 Tahun 2008. Dengan demikian, harga jual dari buku teks pelajaran dapat terjangkau oleh orang tua murid, serta dapat menghilangkan monopoli penerbitan buku pelajaran.

4.2 Kondisi Pendidikan Kota Padang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Pendidikan kini juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Kota Padang sebagai salah satu sentra pendidikan di Sumatera Barat menyediakan begitu banyak fasilitas pendidikan, mulai dari gedung sekolah dari TK hingga SMU, serta Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Berdasarkan data Sensus 2008 Kota Padang, penduduk Kota Padang yang mengenyam pendidikan dasar sebesar 65,3%. Jika berdasarkan kelompok umur 5 tahun ke atas, dapat dilihat pendidikan mereka pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Persentasi penduduk 5 tahun keatas menurut status pendidikan di Kota Padang tahun 2008

Kelompok Umur	Tdk/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah lagi	Total (%)
5-6	2,3	1,6	0,0	3,9
7-12	0,1	12,9	0,2	13,2
13-15	0,0	6,1	0,4	6,5
16-18	0,0	4,4	1,9	6,3
>18	0,7	8,0	61,4	70,1
Jumlah (%)	3,1	33,0	63,9	100,0

Sumber : BPS Kota Padang tahun 2008

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat persentase dari penduduk Kota Padang yang mengecam pendidikan. Jika dilihat dari umur, maka usia 5 sampai dengan 12 tahun adalah usia siswa sekolah dasar. Pada data jumlah dari populasi penduduk mencapai 14% dari total penduduk.

4.3 Deskripsi Dinas Pendidikan Kota Padang

Salah satu instansi pemerintah yang mengelola pendidikan adalah Departemen Pendidikan. Pada departemen ini, seluruh aktifitas perencanaan, pelaksanaan maupun kemajuan pendidikan di tanah air dikerjakan. Jika Departemen Pendidikan berada pada tingkat pusat, maka untuk mengelola pendidikan di setiap daerah dibentuklah Dinas Pendidikan pada tingkat Provinsi, dan Kab/Kota. Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan salah satu bagian dari Departemen Pendidikan pada tingkat kota.

Dinas Pendidikan Kota Padang berada di pusat kota, yakni di Jl. Tan Malaka Kelurahan Sawahan, Padang Timur Sumatera Barat. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Padang dipimpin oleh Drs. H. M.Nur Amin, M.Pd. Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, antara lain :

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan
2. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya
3. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi berikut :
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas
- 5. Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Visi, Misi Dinas Pendidikan Kota Padang

Setiap organisasi pada dasarnya memiliki visi dan misi yang akan dilaksanakan selama periode tertentu. Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai salah satu organisasi publik juga memiliki visi dan misi. Visi Dinas Pendidikan Kota Padang adalah: mewujudkan pendidikan berkualitas yang bertakwa, beradab dan berbudaya tinggi serta menjadi pelopor keteladanan, melalui sistem dan iklim pendidikan yang kondusif.

Untuk menjalankan visi ini, perlu ada langkah kongkrit yang dilakukan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Padang menyusun beberapa misi sebagai aplikasi dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pendidikan Kota Padang adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, wawasan kebangsaan, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan.
- b. Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang berorientasi pada pembinaan nilai keagamaan, budi pekerti dan nilai adat istiadat.

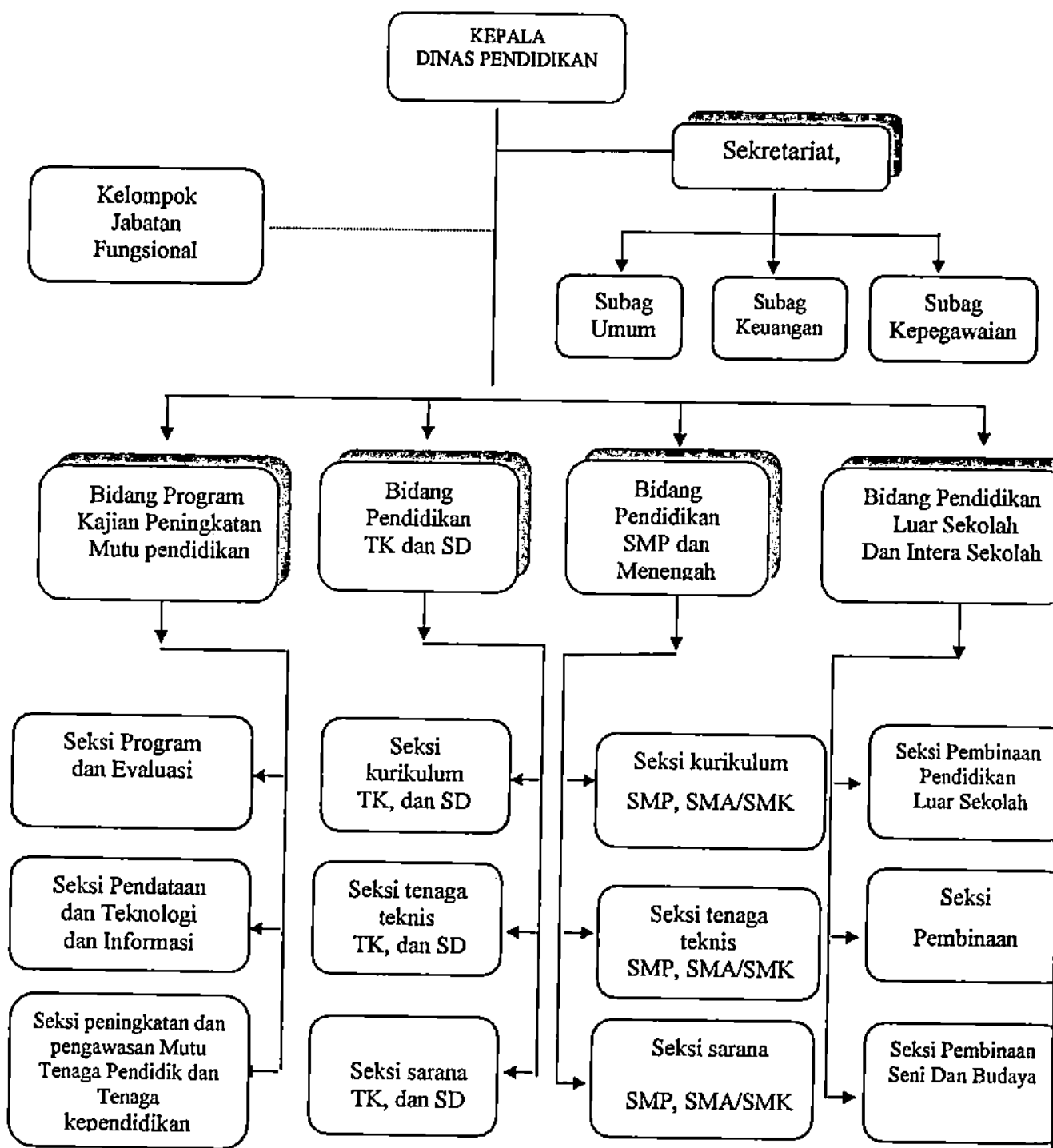
- c. Mewujudkan tercapainya pemerataan pendidikan, relevansi, peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan.
- d. Mempelopori pembaharuan pendidikan dalam semangat demokrasi.
- e. Mendorong kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f. Mewujudkan tercapainya manajemen berbasis sekolah dalam menciptakan sekolah yang efektif dan mandiri.
- g. Mengembangkan kualitas profesi tenaga pendidikan, peningkatan disiplin etos kerja yang menguasai teknologi dan informasi.
- h. Meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap semua pengguna jasa pendidikan.

Tabel 4.2 Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Kota Padang

No	N a m a	NIP	Jabatan
1	Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd	130607244	Kepala Dinas
2	Drs. H. Sudirman M.Pd	130888875	Ka. Bidang Dikmen
3	Drs. Bambang S M.Pd	131469287	Ka. Bidang Dikdas
4	Drs. Wirnadi A	131471139	Ka. Bidang KPMP
5	Drs. Asrizal	131407521	Ka. Bidang PLS dan Kesiswaan
6	Aidevita Rydas SE	131107805	Ka. Bagian Tata Usaha
7	Anfadli SE, M.Pd	131689433	Kasi Korwas dan
8	Zainir SH, M.Si	131592694	Kasi PMTK
9	Drs. Mara Sutan	130888979	Kasi Pembinaan SMA
10	Drs. Meidiyanto		Kasi Pembinaan SMK
11	Drs. H. Azizi M.Pd	130681233	Kasi Pembinaan SMP
12	Dra. Laila Fatma	130824568	Kasi Pembinaan SD
13	Ellinda Siswati SE	100238350	Kasubag Keuangan
14	Syahrinar SH	131865841	Kasubag Umum
15	Drs. Suardi		Kasi Kesiswaan

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Padang 2010

Gambar 4.2 Susunan Organsisi Dinas Pendidikan Kota Padang



Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2010

4.4 Sekolah Dasar Di Kota Padang

Pelaksanaan buku sekolah elektronik yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan, melibatkan seluruh sekolah negeri yang ada di Indonesia. Berdasarkan data statistik, jumlah sekolah di Kota Padang setidaknya ada 346 sekolah dasar yang tersebar di seluruh Kota Padang. Banyaknya sekolah yang ada tersebar mulai dari pusat kota dan pinggir kota. Sekolah yang berada di pusat kota pada umumnya memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan sekolah di pinggir kota. Selain fasilitas, akses memperoleh informasi juga lebih cepat. Data sekolah berdasarkan kecamatan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Kelas, Murid dan Guru pada Sekolah Dasar Negeri Menurut Kecamatan

Kecamatan		Sekolah	Kelas	Murid	Guru
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	19	13	3,282	196
2	Lubuk Kilangan	32	168	4,884	27
3	Lubuk Begalung	37	433	9,720	498
4	Padang Selatan	35	373	7,020	425
5	Padang Timur	35	367	6,876	370
6	Padang Barat	28	194	5,368	330
7	Padang Utara	25	190	6,550	445
8	Nanggalo	20	171	4,932	355
9	Kuranji	53	501	12,872	789
10	Pauh	20	181	4,621	300
11	Kota Tengah	58	490	13,997	913

Sumber: data BPS Sumatera Barat dalam Angka tahun 2008

Jumlah sekolah dasar di Kota Padang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Padang, jumlah sekolah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Sekolah di Kota Padang Tahun 2004-2008

Tahun	Sekolah	Kelas	Murid	Guru
2008	352	3,204	80,104	4,886
2007	354	2,226	82,345	4,475
2006	355	3,454	33,357	4,218
2005	354	2,789	32,538	4,272
2004	354	2, 756	32,108	3,834

Sumber: data BPS Kota Padang dalam Angka Tahun 2008

Untuk mengetahui implementasi dari program BSE di Kota Padang, peneliti memilih beberapa sekolah sebagai sampel dalam penelitian ini. Sekolah yang peneliti tunjuk sebagai sampel, merupakan sekolah yang ada di pusat kota dan di pinggir kota. Pemilihan sekolah ini, setidaknya dapat mengetahui sejauh mana program ini berjalan, dan dapat mewakili sekolah yang ada. Peneliti memilih empat buah sekolah sebagai objek sampel, yakni SD Negeri Percobaan Ujung Gurun, SD Negeri 03 Alai, SD Negeri 03 Kampung Dalam dan terakhir SD Negeri 15 Ulu Gadut. Namun dalam perjalanannya, SD Negeri 03 Alai tidak lagi dijadikan sebagai sampel. Ini disebabkan pihak sekolah yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi dengan berbagai alasan.

SD Negeri yang pertama kali peneliti teliti adalah SD Negeri 03 Kampung Dalam. Lokasi sekolah ini tidak jauh dari Universitas Andalas. Sekolah ini memiliki 6 ruang kelas, satu ruang kepala sekolah dan ruang guru. Secara keseluruhan, bentuk bangunan dari SD Negeri 03 adalah bentuk leter U. Walaupun dekat dengan kampus, namun kondisi dari sekolah tidak jauh berbeda dengan sekolah pinggir kota, tidak ada fasilitas yang mencolok. Saat ini SDN 03 Kampung Dalam di pimpin oleh Ibu Ratnidar, S. Pd sebagai kepala sekolah.

Sekolah selanjutnya yang menjadi objek penelitian peneliti adalah SD Negeri 15 Ulu Gadut. Secara keseluruhan, SD ini memiliki 24 ruang kelas, satu ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru dan UKS. Area sekolah ini juga dapat dikatakan cukup luas dengan gedung berlantai dua. Jumlah staf pengajar sekolah ini berjumlah 34 orang, dengan kualifikasi guru S1 sebanyak 15% dan selebihnya masih menjalankan pendidikan. Saat ini SDN 15 Ulu Gadut memiliki lebih dari 826 orang siswa.

Sekolah terakhir yang menjadi sampel penelitian peneliti adalah SD Negeri Percobaan yang berlokasi di Ujung Gurun. Sekolah ini sudah berstandar internasional sejak dua tahun yang lalu. Sarana dan prasarana sekolah ini sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas, musholah, lab komputer, lab bahasa, lapangan, UKS, ruang guru dan ruang kepala sekolah, serta perpustakaan. Setiap kelas menggunakan *bilingual* bahasa, dan staf guru terdiri atas dua pengajar yakni guru tetap dan honorer. Selain itu, sekolah ini juga sudah memiliki jaringan internet, sehingga ketika siswa diajarkan komputer juga diajarkan mengoperasikan internet.

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Program Buku Sekolah Elektronik, Tujuan dan Sasaran BSE

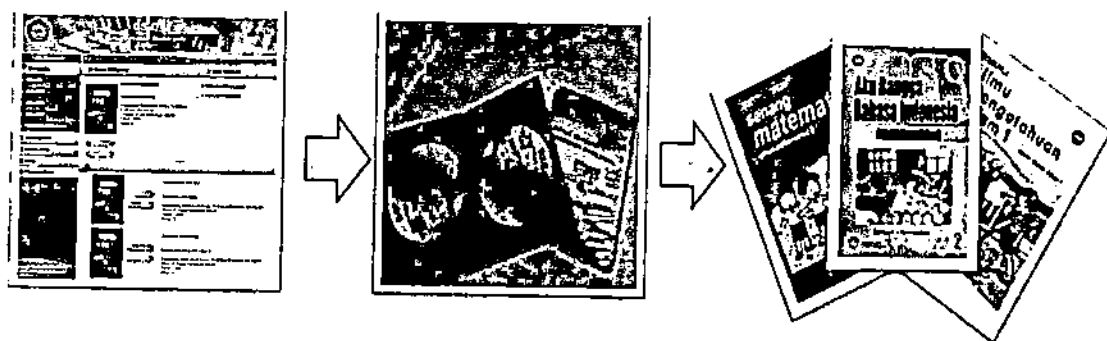
Program buku sekolah elektronik (BSE) merupakan program yang dikeluarkan oleh Depdiknas untuk mengatasi mahalnya harga buku pelajaran yang menjadi keluhan banyak orang tua murid di sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Depdiknas membeli hak cipta judul buku pelajaran yang dianggap layak pada penerbit/ penulis buku. Buku-buku pelajaran yang sudah dibeli, kemudian disajikan dalam format elektronik yang dinamakan Buku Sekolah Elektronik.

Program buku gratis ini dapat diunduh melalui website www.bse.depdiknas.go.id. Kehadiran program ini setidaknya menjadi alternatif memperoleh buku gratis saat harga buku melambung tinggi. Jika tahun 2008, Depdiknas mempersiapkan 407 judul buku pelajaran yang siap diunduh oleh masyarakat, maka tahun 2010 jumlahnya bertambah dua kali lipat menjadi 808 buah buku. Semua judul buku yang ada di website ini dapat diperoleh secara gratis, dan dapat dialihmediakan sesuai kebutuhan.

Pada awal peluncurannya, program BSE hanya dapat diakses melalui media internet. Namun setelah banyak ditemukannya kendala dalam implementasi program ini di lapangan seperti: tidak semua sekolah di daerah memiliki fasilitas komputer dan internet untuk mengakses website, anggaran yang tersedia, ataupun jaringan internet, maka Depdiknas mengeluarkan kebijakan baru dengan menggandakan program BSE menjadi kepingan CD yang dibagikan pada setiap sekolah di seluruh Indonesia.

Sampai tahap ini, implementasi BSE juga masih mengalami kendala. Tidak semua sekolah memiliki komputer untuk membuka program BSE. Kalaupun harus mencetak dan di fotokopi untuk dibagikan pada seluruh siswa, hasilnya kurang memuaskan, karena siswa juga lebih menyukai buku pelajaran yang berwarna. Tahap selanjutnya, Depdiknas mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran BOS buku yang diambil dari dana BOS untuk membeli BSE yang sudah dicetak oleh penerbit sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan Permendiknas No.2 Tahun 2008.

Gambar 5.1 Perubahan Tampilan Buku Sekolah Elektronik



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

Implementasi program BSE di Kota Padang sudah dimulai tahun 2008. Pada awalnya sekolah mendapatkan sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Padang, dan pembagian CD program BSE. Pada tahap ini sekolah belum mewajibkan setiap siswa untuk memiliki BSE, dan masih menggunakan buku cetak yang diterbitkan oleh penerbit. Namun setelah ditetapkannya Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku yang melarang pihak sekolah menjual buku pada seluruh siswa, dan pemberian dana BOS Buku untuk membeli BSE, sekolah baru melaksanakan

program ini. Untuk memperkenalkan program ini, Dinas Pendidikan Kota Padang melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah. Untuk mempermudah sosialisasi program BSE ini, sosialisasi dilakukan pada sekolah melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan) per kecamatan. Setiap kecamatan di Kota Padang memiliki satu UPTD, dan saling berkoordinasi dalam menjalankan program pendidikan. Ini memudahkan Dinas Pendidikan mensosialisasikan setiap program pada seluruh sekolah di Kota Padang.

Salah satu alasan sekolah di Kota Padang menjalankan program ini adalah, adanya himbauan pada setiap sekolah yang menerima bantuan berupa dana BOS, maka diwajibkan membeli BSE pada siswanya. Saat ini anggaran yang disediakan untuk membeli buku ini Rp. 15.000/ siswa yang diambil dari dana BOS. Ada perbedaan penerimaan dana BOS antara satu sekolah dengan sekolah lain, ini disebabkan alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah.

Pada dasarnya implementasi program BSE dapat dibedakan menjadi dua, yaitu program BSE dalam bentuk virtual dengan mengakses website Depdiknas, dan BSE yang sudah dicetak oleh penerbit. Implementasi BSE di Kota Padang dalam bentuk virtual sudah diterapkan di SDN Percobaan Ujung Gurun. Sedangkan BSE dalam bentuk cetak diterapkan di seluruh sekolah di Kota Padang yang mendapatkan bantuan dana BOS. Berdasarkan hasil temuan peneliti, SDN 03 Kampung Dalam maupun SDN 15 Ulu Gadut sudah menggunakan BSE dalam bentuk cetak. Sekolah ini juga sebelumnya mendapatkan program BSE dalam bentuk CD yang dibagikan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Implementasi program BSE dalam bentuk virtual maupun cetak, sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. SDN Percobaan Ujung Gurun dapat menerapkan program BSE dalam bentuk virtual karena memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet. Sebaliknya SDN 03 maupun SDN 15 Ulu Gadut tidak memiliki fasilitas komputer dan internet yang dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi para siswanya. Selain itu, SDN Percobaan juga sudah memiliki situs sekolah yang terkoneksi dengan website Depdiknas. Adanya koneksi ini memberikan kemudahan pada siswa di SDN Percobaan untuk membuka program BSE untuk membaca atau mencari tugas sekolah.

Kehadiran program BSE kurang lebih sudah menginjak tahun ketiga. Ada banyak tanggapan yang diberikan oleh masyarakat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Pada tataran guru di sekolah, sangat terbantu dengan adanya program ini. Selain menambah bahan ajar, materi yang disajikan buku ini tidak jauh berbeda kualitasnya dengan buku dari penerbit sebelumnya, disamping itu materi yang ada lebih tepat sasaran untuk murid.

Kehadiran BSE ditanggapi antusias oleh para siswa. Selain harganya yang cukup murah, siswa juga menilai materi/ soal-soal yang ada pada BSE lebih sulit dibandingkan buku sebelumnya. Sehingga materi yang ada lebih mudah dicerna dengan pembahasan yang singkat. Umumnya siswa cukup puas dengan materi ataupun kualitas buku yang mereka gunakan setiap harinya.

Untuk melihat implementasi BSE, menurut Hogwood dan Gunn setidaknya ada 10 syarat dari implementasi kebijakan/ program yang akan dilaksanakan. Pada implementasi BSE ini, peneliti hanya melihat implementasi dari 5 aspek yang pada

dasarnya dapat mewakili 10 syarat implementasi Hogwood dan Gunn. Aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi BSE ini, diantaranya adalah: berdasarkan kondisi eksternal, berdasarkan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu, berdasarkan hubungan saling ketergantungan kecil, berdasarkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan, berdasarkan komunikasi dan koordinasi yang sempurna³⁶.

Untuk menjelaskan aspek-aspek tersebut, berikut ini peneliti jelaskan secara satu persatu. Dari penjelasan ini, akan dapat menjelaskan implementasi program buku sekolah elektronik di Kota Padang.

5.1.1 Berdasarkan Jaminan Bahwa Kondisi Eksternal Yang Dihadapi Oleh Lembaga/Badan Pelaksana Tidak Akan Menimbulkan Masalah Besar

Sebuah kebijakan/ program sangat bergantung pada pimpinan sebagai pemberi instruksi pada bawahannya. Program BSE merupakan salah satu program pusat yang dilaksanakan di daerah (*top down*). Karena program ini bersifat komando, faktor eksternal juga mempengaruhi implementasi program. Peneliti melihat bahwa model teori implementasi menurut Hogwood dan Gunn teraplikasi dalam kasus ini, dimana ada jaminan kondisi eksternal yang tidak mempengaruhi implementasi program, karena Depdiknas sebagai pelaksana tunggal dalam program ini. Hogwood dan Gunn menambahkan, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi program dapat berupa politik/ pergantian pimpinan pelaksana program.

³⁶ Nugroho D, *loc.cit.*, hal:18

Pergantian pimpinan pada implementasi program BSE dapat dilihat pada pergantian menteri pendidikan, kepala Dinas Pendidikan, ataupun kepala sekolah. Pergantian pimpinan pada sebuah instansi pada dasarnya di luar kendali dari para implementor yang menjalankan program. Setiap pergantian pimpinan pada sebuah instansi, maka akan berganti pula kebijakan yang akan dilaksanakan, apakah program ini akan terus berjalan, dihentikan ataupun dirubah.

Setelah tiga tahun program BSE ini berjalan di Kota Padang, faktor eksternal seperti pergantian pimpinan tidak mempengaruhi program ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. H. M.Nur Amin, M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Padang:

"... pelaksanaan program ini tidak akan berubah walaupun berganti pemimpin, apakah itu menteri pendidikan atau kepala dinas. Karena program ini sudah diatur dalam Permendiknas, dan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk program ini lewat BOS buku. Walaupun saya nanti diganti, program ini akan terus berjalan. Sesuai dengan amanah rakyat untuk program sekolah gratis, yang meliputi uang pembangunan sekolah, iuran perbulan dan buku pegangan..³⁷"

Penjelasan kepala dinastersebut memperlihatkan bahwa kondisi eksternal, seperti pergantian pengambil maupun pelaksana kebijakan tidak memberikan kendala yang menimbulkan gangguan pada pelaksanaan program ini. Selain itu, pertimbangan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk melaksanakan program yang sudah berjalan, harus menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk terus melanjutkan program yang

³⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd, 18 Maret 2010, pukul 11.00 WIB

masih berjalan walupun sudah berganti kepemimpinan pada instansi ini. Begitu juga ungkapan dari Ibu Ratnidar, S.Pd sebagai kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam:

"...Pada dasarnya kami berpendapat, program ini akan terus berjalan, karena program ini sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, kebijakan ini juga cukup membantu orang tua murid untuk tidak membeli buku pegangan yang memberatkan mereka. Yang paling penting, kebijakan itu jangan terus diganti-ganti supaya lebih memudahkan orang tua, siswa dan kami dalam mengelola dan memajukan pendidikan..³⁸."

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala sekolah SDN Percobaan :

"...saya kira tidak ada pengaruh yang signifikan jika terjadi pergantian pimpinan (mendiknas, kadin, kepek) pada program BSE ini. Karena program ini baru berjalan dua tahun, ibaratnya masih masih baru, dan tahap sosialisasi..³⁹."

Ungkapan dari informan di atas mencerminkan bahwa mereka tidak merasakan adanya pengaruh pergantian pimpinan pada pelaksanaan program BSE khususnya di Kota Padang. Ini mencerminkan bahwa implementasi program BSE telah memberi dampak positif pada keberhasilan program ini setelah 3 tahun berjalan. Hal ini tercermin ketika mereka memberikan jawaban ketika wawancara, dengan spontan informan menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan pergantian pimpinan pada implementasi program ini.

Jika dilihat dari fakta dilapangan, maka berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti juga menemukan fakta yang sama. Berikut ini peneliti tampilkan perubahan pimpinan/ jabatan dalam implementasi program BSE:

³⁸ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

³⁹ Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDN Percobaan, 23 Maret 2010, pukul 12,10 WIB

Tabel 5.1 Perbandingan Pimpinan Pada Implementasi BSE

No.	Jabatan	Periode kepemimpinan		Implementasi BSE	Kebijakan yang diambil
1	Menteri Pendidikan RI	Bambang Sudibyo (tahun 2004 – 2009)	Muhammad Nuh (tahun 2009 – 2014)	Berjalan	Terus dijalankan walaupun berganti pimpinan
2	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Drs. H. Nur Amin, M.Pd (tahun 2005 – 2010)	Drs. H. Nur Amin, M.Pd (tahun 2010 – 2015)	Mejalankan program BSE sejak tahun 2008	Terus menjalankan program BSE
3	Kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam	Ratnidar, S.Pd (tahun 2008 s.d saat ini)		Mejalankan program BSE sejak tahun 2008	Terus menjalankan program BSE
4	Kepala sekolah SDN 15 Ulu Gadut	Musnawati, S.Pd (tahun 2000 s.d 2010)	Ernawati, S.Pd (tahun 2010 s.d saat ini)	Mejalankan program BSE sejak tahun 2008	Terus menjalankan program BSE
5	Kepala sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun	Saparman Nur, S.Pd (tahun 2006 s.d saat ini)		Mejalankan program BSE sejak tahun 2008	Terus menjalankan program BSE

Sumber : Data Olahan Peneliti, tahun 2010

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dilihat pergantian pimpinan pada instansi pelaksana program BSE. Program BSE merupakan program yang mulai bergulir pada tahun 2008, ketika Mendiknas masih dijabat oleh Bambang Sudibyo. Program BSE saat itu masih dalam bentuk virtual, yang dapat diakses menggunakan internet. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, tahun 2009 jabatan Mendiknas sudah berpindah pada Muhammad Nuh sebagai Mendiknas yang baru. Namun pergantian pimpinan pada departemen ini tidak menghentikan program BSE, setidaknya hingga tahun 2010 program BSE ini masih terus berjalan.

Implementasi BSE mengalami perubahan bentuk menjadi dua, yaitu BSE dalam bentuk cetak dan virtual. Ini dapat dilihat dari anggaran yang diberikan pemerintah pada sekolah untuk membeli BSE sebagai buku pegangan siswa, atau

masih berfungsinya website <http://bse.depdiknas.go.id> yang digunakan untuk mengunggah BSE dalam bentuk digital. Hal serupa juga terjadi ketika terjadi pergantian kepala sekolah di SDN 15 Ulu Gadut, pergantian kepala sekolah tidak diikuti oleh pergantian kebijakan menggunakan BSE di sekolah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun:

“..Pada awalnya dinas pendidikan memberikan CD program BSE pada setiap sekolah di kota padang, dan saya yakin semua sekolah sudah memiliki CD tersebut. Di dalamnya ada petunjuk penggunaan dan daftar buku pelajaran yang di sedikan untuk digunakan oleh siswa. Tapi ini balik lagi ke sekolah masing-masing, karena belum semua sekolah yang memiliki perangkat komputer..⁴⁰”

Perubahan program BSE dari bentuk virtual yang diakses melalui internet, hingga berubah bentuk dalam bentuk CD ataupun cetak tergantung pada kebijakan yang diambil dari pimpinan pada instansi ini. Ini menyebabkan staff/ implementor hanya menjalankan setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh pimpinan.

Sistem kepemimpinan yang formal/ komando ini menghendaki bawahan yang patuh pada setiap keputusan yang diambil oleh atasan. Hal ini juga berlaku pada implementasi program BSE. Semua keputusan pelaksanaan program, sangat bergantung pada instruksi yang diberikan oleh menteri pendidikan selaku pemegang otoritas pendidikan di negeri ini. Selanjutnya instruksi ini harus dijalankan hingga tingkat provinsi, Kabupaten/Kota oleh para kepala Dinas Pendidikan.

Kepatuhan pada instruksi yang telah dibuat peneliti temukan di lapangan. Sejak dikeluarkannya surat edaran Mendiknas No.88/MPN/LL/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang program BSE. Dinas Pendidikan membuat surat edaran yang mengacu

⁴⁰ Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDN Percobaan, 23 Maret 2010, pukul 12,10 WIB

pada penggunaan BSE pada sekolah-sekolah di Kota Padang. Karena penggunaan BSE ini *include* pada dana BOS, Diknas kemudian membuat surat edaran pada sekolah untuk penggunaan dana BOS untuk membeli buku BSE sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOS. Surat edaran yang peneliti maksud dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga kepala sekolah, semua sekolah mendapatkan surat edaran yang sama tahun 2009. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratnidar, S.Pd:

".. kalau surat edaran yang dari kadin tentang program BSE, sekolah pernah mendapatkannya sekitar tahun 2009. Surat itu juga mengacu pengelolaan dana BOS untuk membeli BSE..⁴¹"

Tidak jauh berbeda dengan SDN 03 Kampung Dalam, SD yang peneliti teliti umumnya juga mendapat surat yang sama. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, sekolah juga mulai mengalokasikan dana BOS yang sebelumnya hanya untuk operasional sekolah, kini ditambah untuk membeli buku pelajaran yang akan digunakan oleh siswa disekolah. Ketentuan pembelian BSE dari alokasi dana BOS dapat dilihat pada buku pedoman BOS. Pada bab VI pedoman pengadaan buku teks pelajaran, sekolah memiliki kewajiban membeli buku teks pelajaran yang sudah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas (BSE).

Umumnya kepala sekolah melaksanakan program BSE yang telah dibuat oleh Depdiknas. Dari ketiga sekolah yang menjadi objek penelitian peneliti, sekolah melaksanakan program BSE ini, dengan kemampuan dan sarana dan prasarana yang

⁴¹ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

ada. Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya, program BSE ini pada awalnya hanya dapat diakses menggunakan internet. Program ini belum dapat disosialisasikan oleh kepala sekolah SDN 03 dan SDN 15, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Namun program ini sudah diperkenalkan pada siswa pada SDN Percobaan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Sumarni guru SDN 15 Ulu gadut:

"..kami tidak mengajarkan BSE yang diakses lewat internet di sekolah, karena komputer di sekolah hanya digunakan untuk administrasi sekolah dan jumlahnya juga terbatas. Sehingga kami tidak mengajarkan BSE di sekolah pada siswa, selain itu program ini juga perlu jaringan internet. Sekolah kami juga belum memiliki jaringan internet..⁴²"

Berbeda dengan SDN 15 Ulu Gadut, SDN Percobaan mengajarkan program BSE pada para siswanya di sekolah:

"..Dari segi fasilitas kami memiliki 60 unit komputer yang dapat digunakan siswa dalam belajar komputer dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka sudah pandai menggunakan komputer maupun internet, program *office*, ataupun mencari materi pelajaran di sekolah dapat mereka lakukan. Untuk BSE yang dapat diakses melalui internet, mereka juga bisa mengakses..⁴³"

Adanya perbedaan kepatuhan pelaksanaan program di lapangan, dikarenakan faktor sarana dan prasarana yang ada. Kepatuhan pada perintah pusat kepala Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah untuk menjalankan program BSE tidak dapat disamaratakan, karena kebijakan ini tidak mempertimbangkan setiap sekolah memiliki kompleksitas masalah yang bervariasi. Misalnya guru-guru

⁴² Wawancara dengan guru SDN 15 Ulu Gadut Dra. Sumarni, 24 Maret 2010, pukul 10.40 WIB

⁴³ Wawancara dengan guru SDN Percobaan Marnis Sulin, S. Pd, 23 Maret 2010, pukul 11.40 WIB

mengimplementasikan “program BSE” berbeda dengan apa yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Guru-guru di SDN 03 dan SDN 15 hanya sebatas memberikan informasi bahwa ada program BSE yang dapat diakses oleh siswa menggunakan internet, tanpa mengajarkan kepada siswa bagaimana cara kerjanya. Atau sebaliknya, sekolah yang memiliki fasilitas internet dan komputer mengajarkan kepada siswanya, cara kerja program BSE.

Implementasi kebijakan sangat membutuhkan rantai komando untuk menjalankan program. Dari data yang penulis peroleh, pihak sekolah tidak mengalami banyak kendala menjalankan program ini. Selain aturan yang dibuat sudah jelas, program ini juga pada dasarnya sudah memiliki tahapan pelaksanaan. Mulai dari akses melalui internet, CD hingga tahap terakhir dengan mencetak program ini dalam bentuk buku cetak. Implementasi ini akan berhasil jika seluruh sekolah mentaati semua instruksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yang telah diturunkan dari pusat. Setiap tahapan pelaksanaan program ini juga harus dilakukan kontrol oleh pembuat kebijakan (Depdiknas). Ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari program ini yang telah dibuat sebelumnya.

Kepatuhan pada pimpinan dalam implementasi program BSE di sekolah dapat dilihat dari penggunaan bse dalam bentuk cetak maupun virtual oleh guru-guru di kelas masing-masing. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Sumarni (guru SDN 15 Ulu Gadut) :

".. kami hanya mengikuti aturan yang sudah di buat oleh kepala sekolah. Jika Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan Bse di kelas, maka kami menggunakan BSE di kelas, padahal sebelumnya kami menggunakan buku Yudistira/ Erlangga..⁴⁴"

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa implementasi program BSE khususnya bagi sekolah dasar di Kota Padang terus berjalan walaupun terjadi hambatan berupa faktor eksternal seperti pergantian pimpinan yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn tentang jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.

5.1.2 Analisis Program BSE Berdasarkan Sumber Daya Yang Memadai, Termasuk Sumber Daya Waktu

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sebagus apapun kebijakan/ program yang sudah dibuat, tapi tidak diikuti oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan ini tidak akan berhasil. Sebagai program pusat, implementasi program BSE sepenuhnya ditopang oleh pemerintah, baik pendanaan maupun sarana dan prasarana.

Pada implementasi program BSE di Kota Padang, setidaknya dibutuhkan sumber daya berupa finansial, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sedangkan dimensi waktu menjadi tolak ukur keberhasilan program, sejauh mana progres dari implementasi program yang dilihat dari waktu pelaksanaannya.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki, peneliti menemukan banyak data tentang perbedaan sumber daya sekolah untuk melaksanakan program BSE di sekolah

⁴⁴ Wawancara dengan guru SDN 15 Ulu Gadut Dra. Sumarni, 24 Maret 2010, pukul 10.40 WIB

masing-masing. Perbedaan ini peneliti kelompokkan menjadi dua, yaitu sekolah berbasis internasional dan sekolah konvensional. Berikut ini peneliti tampilkan perbedaan kedua jenis sekolah berdasarkan sumber daya yang dimiliki tersebut:

a. Finansial

Dalam menjalankan sebuah program, tidak dapat dipungkiri ketersediaan sumber daya, baik berupa SDM maupun finansial sangat dibutuhkan. Sumber daya berupa finansial dibutuhkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah, salah satunya buku pelajaran.

Pada sekolah konvensional (SDN 03 Kampung Dalam dan SDN 15 Ulu Gadut) yang peneliti teliti, sekolah sangat bergantung pada dana BOS yang diberikan pemerintah untuk operasional sekolah. Penggunaan dana BOS untuk membeli BSE sudah dilakukan sejak tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam sebagai berikut:

“... kami menerima dana BOS dari pemerintah pusat untuk operasional sekolah. Setelah keluar surat edaran dari dinas pendidikan, pengelolaan dana BOS ditambah untuk membeli BSE. Jumlah dana BOS yang kami terima berdasarkan jumlah siswa di sekolah ini. Tahun ini kami mendapatkan Rp. 68.834.000 juta, dan jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi kami mengikuti aturan yang sudah ada saja.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa kepala sekolah, peneliti memperoleh data alokasi pembelian buku BSE di sekolah

⁴⁵ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

masing-masing. Adanya perbedaan penerimaan dana BOS pada masing-masing sekolah, menyebabkan perbedaan pada alokasi dana yang digunakan untuk membeli BSE. Sebagai perbandingan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Alokasi Dana BSE dari Dana BOS SD di Kota Padang

No	Sekolah	BOS	BSE
1	SDN 03 Kampung Dalam	Rp. 68.834.000	Rp. 3.252.000
2	SDN 15 Ulu Gadut	Rp. 98.000.000	Rp. 10.392.000
3	SDN Percobaan Ujung Gurun	Rp. 104.000.000	Rp. 9.026.000

Sumber: Data olahan Peneliti, tahun 2010

Dari tabel 5.2, anggaran BOS terbesar pada SDN Percobaan sebesar Rp. 104.000.000,- rupiah. Sedangkan anggaran BOS terendah pada SDN 03 Kampung Dalam sebesar Rp. 68.834.000,- rupiah. Perbedaan jumlah anggaran ini juga menyebabkan alokasi dana untuk membeli tambahan buku pelajaran siswa juga disesuaikan. Alokasi dana yang cukup besar untuk BSE adalah SDN 15 Ulu Gadut senilai Rp. 10.392.000,- rupiah, kemudian dibelikan pada sejumlah buku pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa.

Jika peneliti kaji lebih jauh, anggaran ini sangat kurang untuk menutupi kebutuhan sekolah menyediakan buku pelajaran bagi siswanya. Jika harga satu buku BSE yang diwajibkan pemerintah Rp. 7.000,- /Rp. 8000,-, maka pihak sekolah hanya mampu membeli dua buah buku. Sedangkan siswa

sekolah dasar mendapatkan enam mata pelajaran. Ini berarti setidaknya pemerintah mengkalkulasikan harga buku dengan jumlah mata pelajaran yang ada kurang lebih Rp. 48.000,- / siswa. Selain itu buku yang digunakan siswa, umumnya akan berganti setiap semesternya. Dan ini juga menambah dana yang dibutuhkan menjadi Rp. 96.000,- / siswa setiap tahunnya. Jumlah yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan sekolah sangatlah jauh berbeda. Pada akhirnya program ini menambah beban pihak sekolah. Hal senada juga dikeluhkan oleh kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam pada saat peneliti melakukan wawancara:

”... kalau dihitung-hitung jumlah dana BOS untuk BSE hanya Rp. 15.000/ siswa. Ini sangat kurang untuk membeli semua buku pelajaran yang dibutuhkan oleh anak. Sehingga kami mengambil keputusan untuk mencari donatur, karena sekolah tidak boleh menjaul buku. Pilihan terakhir membebaskan siswa membeli buku di luar sekolah.”⁴⁶

Untuk menutupi kebutuhan buku ini, pihak sekolah harus berfikir keras untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Dengan dikeluarkannya Permendiknas No.2 Tahun 2008 yang melarang pihak sekolah untuk memperjualbelikan buku dari penerbit lain, memaksa sekolah untuk mengambil kebijakan membebaskan siswa/ orang tua murid untuk membeli buku pelajaran di luar sekolah walaupun tidak dipaksakan. Pada akhirnya, orang tua harus mengeluarkan uang untuk menyediakan buku pelajaran lagi.

⁴⁶ *Ibid.*

Adanya larangan memungut SPP pada setiap siswa, juga menjadi salah satu alasan sekolah tidak bisa menyediakan fasilitas yang layak untuk siswa-siswa. Seperti yang diungkapkan Bapak Efendi sebagai salah satu komite sekolah SDN 03 Kampung Dalam yang juga merangkap sebagai guru olah raga⁴⁷:

“...karena sekolah tidak lagi diperbolehkan mengambil uang pangkal/pembangunan pada para siswa, maka kami melakukan dialog dengan para wali murid. Apa solusi yang diberikan untuk membangun fasilitas sekolah, terlebih lagi setelah gempa bumi bulan September tahun lalu yang menyebabkan fasilitas sekolah banyak mengalami kerusakan. Wali murid diberikan kebebasan memberikan donasinya pada sekolah tanpa paksaan atau sukarela. Kami juga meminta bantuan pada perusahaan ataupun perusahaan untuk menutupi operasional sekolah yang cukup besar..”

Berbeda dengan sekolah konvensional, SDN Percobaan tidak memiliki hambatan pada finansial untuk melaksanakan program BSE. Selain mendapatkan dana BOS, sekolah ini juga memungut SPP dari siswanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eva (orang tua siswa SDN Percobaan):

“..Setiap bulan saya membayar Rp 35.000 untuk SPP anak saya, dan untuk anak saya yang kelas 6 ada tambahan Rp. 75.000 untuk pendalaman materi. Kadang saya iri dengan anak-anak sekolah lain yang tidak dipungut biaya. Tapi SPP ini juga sudah diberitahu kegunaannya, untuk fasilitas sekolah, dan saya hanya bisa mengikuti aturan sekolah saja...⁴⁸”

⁴⁷ Wawancara Dengan Komite Sekolah Bapak Efendi, 24 Maret 2010, pukul 11,55 WIB

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Eva, 23 Maret 2010, pukul 12,55 WIB

Data ini sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh dari kepala sekolah SDN Percobaan terkait penarikan iuran SPP pada orang tua siswa. Ini dilakukan karena beban operasional sekolah yang cukup tinggi.

“... Karena sekolah ini berbasis internasional, kami juga tidak menutup mata dalam pengelolaanya. Kami membutuhkan banyak anggaran untuk menyediakan fasilitas, baik guru dalam satu kelas yang bilingual, internet, listrik, dan anggaran pendukung lain, kalau mengandalkan dari dana bos rasanya tidak mungkin, jadi kami memiliki dana pendamping, yakni anggaran yang dimintakan pada orang tua murid. Setiap anak dikenakan iuran sebesar Rp. 35.000 setiap bulan, khusus siswa yang kurang mampu kami tidak membebankan atau mereka hanya bayar separuhnya saja. Selain itu, kami juga mendapat bantuan dari Pemda. Tanpa bantuan dari luar mustahil kami dapat menjalankan sekolah ini...”⁴⁹

Adanya anggaran BOS dan SPP yang diambil dari siswa, menutupi semua kekurangan dana untuk menyediakan seluruh sarana dan prasarana seperti penyediaan buku BSE, komputer, jaringan internet maupun *hot spot*. Selain itu, sekolah juga menyarankan kepada siswa menggunakan beberapa buku sebagai literatur selain BSE.

b. Sumber daya manusia

Salah satu tujuan awal hadirnya program BSE adalah merangsang siswa untuk kreatif dengan bantuan teknologi, sehingga tidak gagap teknologi. Program BSE yang pada awalnya hanya dapat diakses menggunakan internet, membutuhkan SDM yang menguasai teknologi informasi. Program ini

⁴⁹ Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDN Percobaan, 23 Maret 2010, pukul 12,10 WIB

menuntut guru-guru di sekolah harus mengajarkan program ini kepada para siswa, harus bisa menggunakan media ini. Namun data yang peneliti temukan di lapangan tidak semua guru dapat menggunakan program BSE dalam bentuk virtual, ataupun menggunakan media komputer dan internet. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratnidar, S.Pd kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam:

“...Kemampuan guru untuk menggunakan internet maupun komputer juga masih sangat minim. Jika dipersentasikan, kemampuan guru menggunakan media ini hanya 3 atau 4 orang dari total 12 orang. Disamping lambat menguasai teknologi baru, mereka juga ada perasaan canggung...”⁵⁰”

Dari data yang peneliti temukan di lapangan, masih minimnya tenaga pengajar yang memiliki kemampuan ada bidang TI, mengakibatkan sekolah belum siap untuk mengimplementasikan program BSE dalam bentuk virtual. Ini juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan BSE untuk melatih siswa lebih dekat dengan TI dan tidak gagap teknologi. Hasil observasi yang peneliti lakukan juga menunjukkan data yang serupa. Ketika salah seorang guru peneliti minta untuk mengoprasikan komputer yang ada di perpustakaan, namun guru tersebut menggelengkan kepala. Hasil wawancara peneliti dengan guru tersebut sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

”.. saya tidak terlalu bisa menggunakan komputer. Kalau di sekolah saya meminta bantuan guru-guru yang lain, tapi kalau di rumah saya meminta bantuan anak, atau keluarga. Mungkin karena faktor usia, sehingga yang tidak pandai menggunakan komputer atau internet...”⁵¹

Sedangkan SDM guru untuk mengajarkan program BSE yang sudah dicetak, tidak mengalami banyak kendala. Setidaknya peneliti melakukan kroscek pada murid yang ada di sekolah tentang kemampuan guru mengajarkan mata pelajaran menggunakan buku BSE. Umumnya siswa menjawab tidak ada masalah, guru-guru mengajarkan seperti biasa.

Berbanding terbalik dengan kemampuan SDM di sekolah konvensional, umumnya guru-guru yang ada di SDN Percobaan sudah memiliki kemampuan menggunakan media komputer, internet, bahkan dari hasil pengamatan peneliti guru-guru sudah menggunakan LCD untuk menjelaskan mata pelajaran di kelas. Ini menunjukkan SDM di sekolah ini sudah sangat baik. Selain itu guru di sekolah ini(Murnita CM), juga pernah mengikuti pelatihan konten Jardiknas Provinsi Sumatera Barat yang diadakan oleh Departemen Pendidikan nasional pada tanggal 27-30 Juli 2010⁵²

Dengan kemampuan guru-guru di sekolah menggunakan komputer dan internet ini, memberi kemudahan guru mengajarkan program BSE pada para siswa. Terlebih lagi sekolah ini sudah terkoneksi dengan jejaring website Depdiknas pada website sekolah. Sehingga para siswa dapat dengan mudah

⁵¹ Wawancara dengan guru SDN 15 Ulu Gadut Dra. Sumarni , 24 Maret 2010, pukul 10.40 WIB

⁵² http://jardiknas.kemendiknas.go.id//indeks_php?option=com_content=article&id=1517_pelatihan_konten_jardiknas_provinsi_sumatera_barat

mengunduh ataupun mempelajari BSE dalam bentuk virtual. Tidak berbeda jauh dengan program BSE dalam bentuk virtual, guru-guru di sekolah ini juga tidak mengalami kendala mengajarkan program BSE dalam bentuk cetak yang dipinjamkan pada siswa di sekolah.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn tergantung dari SDM yang dimiliki untuk menjalankan program ini. Setidaknya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya dan para pembuat kebijakan kedepan untuk mempertimbangkan SDM yang ada. Perbedaan kemampuan SDM (guru-guru) menggunakan media komputer di sekolah konvensional dan internasional menjadi gambaran nyata, ketidaksiapan guru-guru melaksanakan program BSE. Ketidaksiapan SDM ini menyebabkan program BSE dalam bentuk virtual kurang berhasil karena keterbatasan kualitas guru-guru.

c. Sarana dan Prasarana

Prasarana yang dibutuhkan pada implementasi program BSE adalah komputer dan jaringan internet untuk mengakses program BSE dari website <http://bse.depdiknas.go.id>. Prasarana ini wajib dimiliki sekolah, jika ingin mengajarkan siswanya menggunakan program BSE dalam bentuk virtual. Namun berdasarkan penelitian dan observasi yang peneliti lakukan, ketersediaan prasarana ini di sekolah berbeda-beda. Jika di SDN Percobaan memiliki lab komputer, jaringan internet dan *hot spot* yang dapat digunakan untuk mengakses program BSE, tidak demikian dengan SDN 03 dan SDN 15

Ulu Gadut. Fasilitas komputer di dua sekolah ini, hanya digunakan untuk administrasi sekolah dan jumlahnya terbatas.

”kami hanya punya satu buah komputer yang digunakan oleh tata usaha untuk membuat administrasi sekolah. Sedangkan untuk siswa kami belum memiliki fasilitas ini..⁵³”

Tidak jauh berbeda dengan SDN 03, SDN 15 Ulu gadut juga mengalami hal yang sama. Hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah jumlah komputer yang ada di sekolah sebagai berikut:

”... kami hanya memiliki 3 unit komputer di sekolah. Semuanya ada di ruang perpustakaan 2 unit, dan satu lagi di ruang kepala sekolah. Untuk siswa, sampai saat ini, kami masih kesulitan menyediakannya..⁵⁴”

Keterbatasan inilah yang menyebabkan siswa di kedua sekolah ini tidak mengetahui program BSE. Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

“... Untuk saat ini, fasilitas komputer pada sekolah masih minim. Pada tingkat SD, sekolah hanya diperbolehkan memiliki satu atau dua komputer dari anggaran yang disediakan. Sedangkan untuk SMP dan SMA karena sudah memiliki mata pelajaran TIK maka disediakan lab komputer. Dari segi SDM, umumnya sekolah hanya memiliki 30% staff pengajar yang bisa menggunakan komputer, selebihnya masih seperti biasa. Selain itu baru sebagian sekolah yang terpasang koneksi dengan internet. Peningkatan fasilitas

⁵³ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan guru SDN 15 Ulu Gadut Dra. Sumarni, 24 Maret 2010, pukul 10.40 WIB

sekolah seperti internet dan lainnya, belum dapat kami laksanakan...⁵⁵”

Minimnya sarana dan prasarana pendukung program BSE seperti lab komputer, komputer maupun jaringan internet, secara tidak langsung menjawab hasil *pre test* yang pernah peneliti uraikan pada latar belakang. Rendahnya kemampuan siswa menggunakan komputer ataupun pengetahuan siswa tentang BSE disebabkan sekolah mereka yang belum memiliki sarana dan prasarana ini.

Ada beberapa penyebab sedikitnya siswa menggunakan program BSE dalam bentuk virtual melalui internet. Selain kemampuan siswa pada media ini yang masih minim, ada beberapa alasan mengapa siswa belum mengetahui program ini. Salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Siswa tidak dapat menggunakan komputer/ internet
2. Mahalnya akses internet bagi kalangan siswa
3. Tidak adanya prasarana ini di rumah/sekolah
4. Ketertarikan siswa pada program ini masih rendah dibandingkan kegemaran siswa seperti game online, facebook, dll.

Sedangkan hasil temuan peneliti pada sekolah yang peneliti teliti, ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun SDM masih sangat minim.

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd, 18 Maret 2010, pukul 11.00 WIB

Sebagai deskripsi dari masing-masing sekolah atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BSE:

Tabel 5.3 Perbandingan Sarana dan Prasarana sekolah

No	Sekolah	Fasilitas			Hambatan
		Komputer/ lab komputer	Internet	Guru	
1	SDN 03 Kampung Dalam	1 unit komputer	-	3 orang guru	Minimnya anggaran untuk menambah fasilitas.
2	SDN 15 Ulu Gadut	3 unit komputer	-	30 % guru bisa menggunakan komputer	Anggaran yang ada masih kurang, dan guru-guru masih menggunakan metode konvensional. Sedangkan fasilitas komputer hanya untuk membuat laporan saja.
3	SDN Percobaan Ujung Gurun	40 unit komputer dilengkapi dengan lab komputer	Jaringan internet tersedia, dan fasilitas <i>hot spot</i> juga disediakan di lingkungan sekolah	Semua guru dapat mengoperasikan komputer dan internet.	-

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mutlak implementasi program BSE. Sayangnya tidak semua sekolah memiliki fasilitas ini. Program ini pada awalnya menargetkan sasaran dari program ini sudah memiliki/mudah mengakses komputer dan internet. Berdasarkan pengamatan peneliti, justru dari sasaran program ini, kurang memiliki kemampuan untuk

menggunakan fasilitas ini. Begitupun ketika pemerintah berasumsi memberikan CD program BSE ke setiap sekolah. Padahal tidak semua sekolah memiliki prasarana ini untuk mendukung program. Akibatnya CD BSE yang dibagikan ke setiap sekolah tidak dimanfaatkan oleh sekolah dengan maksimal, karena keterbatasan fasilitas ini. Fakta ini peneliti temukan ketika peneliti mewawancari kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam:

” Dinas Pendidikan memang pernah mengikirmkan CD program BSE ke sekolah, tapi kami tidak menggunakannya. Komputer di sekolah hanya ada satu, kami hanya melihat isinya saja. Tapi tidak kami gunakan selanjutnya..⁵⁶”

Ketersediaan sarana dan prasarana harus menjadi pertimbangan pemerintah ketika membuat sebuah program baru kedepannya.

d. Waktu

Salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan dari implementasi program menurut Briant W. Hogwood dan Lewis A. Gunn adalah dimensi waktu. Waktu juga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan sebuah program. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini sudah tahun ketiga. Sosialisasi program mulai dari penayangan iklan pada media masa, *running tag*, ataupun pada seluruh sekolah terus dilakukan hingga saat ini.

⁵⁶ Wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam Ratnidar, S.Pd, 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

Sejak diluncurkan pertama kali Agustus tahun 2008 hingga kini memasuki tahun 2010, program BSE kurang lebih sudah memasuki tahun ketiga. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam:

“..Buku sekolah elektronik sudah diperkenalkan di SD ini. Pengenalan program ini pada pihak sekolah dari tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, 2009 mulai diperkenalkan buku BSE melalui bentuk fisik. Pertama kali, Dinas Pendidikan mensosialisasikan program ini melalui pertemuan kepala sekolah se Kota Padang. Kemudian Dinas Pendidikan memberikan 8 buah CD BSE kepada sekolah. Di dalam CD tersebut, ada daftar buku yang dapat di gunakan di sekolah⁵⁷..”

Hasil wawancara ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“..BSE sudah kami sosialisasikan pada setiap kepala sekolah di Kota Padang. Kalau SD melalui UPTD yang ada pada masing-masing kecamatan, dan SMP/SMA melalui kepala sekolah KPPS. Kami memberikan CD program BSE pada masing-masing sekolah sebagai rujukan buku mana yang akan di pakai di sekolahnya masing-masing sebagai bahan ajar⁵⁸..”

Jika pada tahun pertama hanya sebatas sosialisasi program BSE pada semua media seperti media cetak, elektronik, seminar maupun rapat koordinasi sekolah pada Dinas Pendidikan pada tingkat Kab/Kota. Maka menginjak tahun kedua ini, implementasi program sudah pada pelaksanaan secara utuh. Setiap sekolah diwajibkan menggunakan program BSE sebagai buku pegangan wajib para siswa di sekolah. Dengan adanya bantuan dana BOS Buku, program ini dapat lebih cepat terrealisasi dengan baik.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ ⁵⁸ Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDN Percobaan, 23 Maret 2010, pukul 12,10 WIB

Secara keseluruhan program ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Kini orang tua murid tidak lagi dibebankan membeli buku pelajaran oleh sekolah, walaupun ada lebih pada menambah referensi bacaan siswa dan tidak dipaksakan oleh pihak sekolah. Tiga tahun perjalanan implementasi program BSE di Kota Padang khususnya pada sekolah dasar, sudah mengalami progres yang cukup baik. Walaupun mengalami kendala di awal peluncuran program, namun perkembangan dari program ini cukup baik pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hasil analisis peneliti, implementasi program BSE pada SD di Kota Padang cukup berhasil walaupun baru memasuki tahun ketiga.

Dengan jangka waktu yang cukup singkat (3 tahun), tujuan dari program ini dapat terwujud walaupun belum sepenuhnya sempurna. Penyediaan buku murah, bermutu dan mudah diperoleh, sudah mulai dirasakan oleh siswa, guru dan masyarakat umum. Alokasi anggaran dari dana BOS, maupun kecanggihan teknologi memberi kontribusi pada pemanfaatan waktu pelaksanaan program ini. Setidaknya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama program ini sudah berjalan dengan baik.

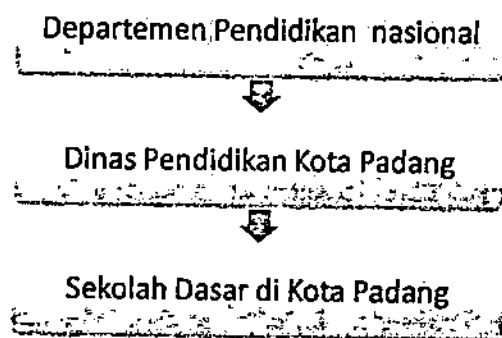
5. 1.3 Analisis Program BSE Berdasarkan Hubungan Saling Ketergantungan Kecil

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), walaupun melibatkan badan/instansi lainnya harus pada tingkat minimal, baik jumlah maupun tingkat

kepentinganya. Program BSE adalah salah satu program pusat yang dilaksanakan di daerah. Program ini secara utuh dikendalikan oleh Depdiknas sebagai pemegang otoritas pendidikan.

Untuk mencapai tujuan BSE, keterlibatan instansi lain sangat dibatasi. Ini dilakukan untuk mengurangi kausalitas yang terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan. Kalaupun terjadi hubungan kerjasama, hubungan itu tidak mengikat dan memberikan tuntutan pada implementor. Pelaksanaan program BSE SD di Kota Padang pada dasarnya hanya dikelola oleh Depdiknas pada tingkat pusat dan Dinas Pendidikan pada tingkat daerah. Dinas pendidikan kemudian meneruskan program ini di setiap sekolah yang ada di Kota Padang. Jika buat skema instansi pelaksana program BSE, dapat dilihat pada gambar 5.2:

Gambar 5.2 Instansi Pelaksana Program BSE di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

Instansi pelaksana tunggal dalam implementasi program BSE merupakan keputusan yang tepat. Karena jika dalam implementasi program ini melibatkan banyak instansi, maka akan memperlambat pelaksanaan program ini. Selain itu,

banyaknya organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan melahirkan banyak kepentingan pula. Tumpang tindih kepentingan juga akan terjadi, ini merupakan salah satu penyebab terlalu lamanya program dilaksanakan. Pelaksana tunggal dari implementasi program BSE ini diungkapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut⁵⁹:

- “.. program BSE di buat oleh Depdiknas, sedangkan kami di daerah hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2008 tentang prosedur buku yang menjadi acuan anak didik..”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, Dinas Pendidikan hanya sebagai implementor pada tingkat daerah sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana setiap kebijakan pendidikan tingkat pusat. Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah yang menjadi objek penelitian peneliti, diperoleh data sebagai berikut:

“... pada awalnya kami mendapat informasi tentang program BSE dari Dinas Pendidikan Kota Padang saat rapat sosialisasi program. Kalau tidak salah tahun 2008, tepatnya kapan, saya tidak ingat. Setelah dilakukan sosialisasi, kami tidak dapat melaksanakan program BSE itu di sekolah karena belum memiliki fasilitas internet dan komputer. Baru setelah dikucurkan dana BOS buku, kami membeli buku sekolah elektronik sesuai dengan panduan judul buku yang dapat digunakan disekolah..⁶⁰”

Infomasi yang serupa juga peneliti dapatkan dari kepala dinas Pendidikan Kota Padang tentang pelaksanaan program BSE di Kota Padang sebagai berikut:

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd, 18 Maret 2010, pukul 11.00 WIB

⁶⁰ wawancara dengan Ratnidar, S.Pd, kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam, 23 Maret 2010, pukul 09.01 WIB

“..program BSE di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Kami mendapatkan informasi ini juga dari UPTD yang ada per kecamatan. Setelah sosialisasi program, saya langsung mengadakan rapat pada majelis guru untuk menjalankan program ini..⁶¹”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan implementasi program BSE merupakan kebijakan yang dilaksanakan sekolah sesuai instruksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Dari hasil pengamatan peneliti, pihak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi buku sekolah. Ini berdampak pada siswa yang terlambat mendapatkan buku pelajaran, dan menyulitkan siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan buku. Salah satunya dengan menerima pemberian buku dari donatur, hal ini juga terjadi di sekolah yang peneliti teliti. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam :

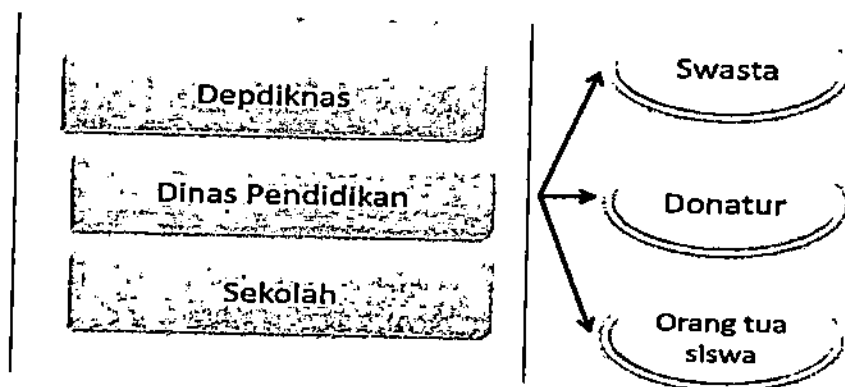
“...Buku sekolah elektronik di sekolah kami didanai dari dana BOS. Dari Rp. 68.834.000,- dana bos yang diberikan, Rp. 3.252.000,- dibelikan buku. Tapi dana tersebut tidak mencukupi membeli buku untuk masing-masing siswa di sekolah ini. Untuk mengatasinya, kami menerima bantuan buku Erlangga dari PLN (Bahasa Indonesia, IPA). Sedangkan kekurangan buku mata pelajaran lainnya, baru kami beli dari dana BOS buku. Kami pun sudah melakukan koordinasi pada Dinas Pendidikan, karena penerbit Erlangga tidak termasuk dalam daftar buku BSE yang diwajibkan pada peserta didik. Kedepan, kami akan melengkapi buku pegangan siswa..⁶²”

⁶¹ wawancara dengan Sarman Nur, kepala sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun, Selasa, 23 Maret 2010, pukul 12.10 WIB

⁶² wawancara dengan kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam, Ratnidar, S.Pd pada tanggal 23 Maret 2010, pukul 08.40 WIB

Hubungan interaksi yang terjadi antara pihak sekolah dengan PLN (donatur), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan buku di sekolah. Peneliti juga menanyakan lebih jauh kepada pihak sekolah, apakah ada konsekuensi sekolah pada pihak donatur. Hasilnya donasi yang diberikan oleh PLN hanya sebagai bentuk bakti sosial peduli pendidikan. Ini tidak menimbulkan tuntutan, sehingga kerjasama yang terjadi antara dua belah pihak ini tidak menimbulkan ketergantungan. Hubungan instansi lain dalam program ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.3 Hubungan Program BSE di Kota Padang dengan instansi lain



sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

Secara keseluruhan, program ini dapat dikatakan program sentralisasi untuk desentralisasi yang bersifat *top down*. Dimana garis perintah/ komando dalam pemberian maupun pelaksanaan perintah. Semua prosedur dan teknis program ini dibuat oleh pusat (Depdiknas). Ini memberikan kemudahan pada implementor dalam menjalankan tugas. Selain adanya kesatuan instruksi, program ini tidak melibatkan

banyak orang/ kelompok kepentingan yang akan mempengaruhi pelaksanaan program. Baik dalam bentuk politisasi, maupun pada pelaksanaan di lapangan.

5.1.4 Analisis Program BSE Berdasarkan Pemahaman dan Kesepakatan Terhadap Tujuan

Tingkat kepaahaman yang berbeda pada implementor dalam menjalankan kebijakan publik akan menghasilkan kegagalan dalam implementasi program. Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika para implementornya tidak mengerti dengan apa yang akan mereka lakukan. Realita di lapangan yang sering kita temukan adalah kebijakan yang terlalu sulit untuk didefinisikan oleh implementor. Ini menyebabkan implementor tidak tahu apa yang harus dikerjakan, atau mengalami kebiasan makna dari tugasnya.

Implementasi program BSE di Kota Padang, pada awalnya juga mengalami masalah yang sama. Program ini mendapat penolakan dari guru-guru. Ini disebabkan guru-guru tidak memahami program BSE dengan baik.

”.. dulu kami tidak mau menggunakan program BSE ini di sekolah. Selain sudah terbiasa dengan buku cetak, program ini juga menggunakan komputer dan internet. Sehingga kami tidak mau menggunakannya di sekolah..⁶³”

Dari hasil wawancara tersebut, penolakan guru-guru untuk menggunakan program BSE lebih pada faktor bihavior ataupun kepraktisan dari penggunaan buku cetak. Selain minimnya pengetahuan guru-guru menggunakan komputer dan internet,

⁶³ Wawancara dengan guru SDN 15 Ulu Gadut Dra. Sumarni , 24 Maret 2010, pukul 10.40 WIB

guru-guru juga menganggap buku cetak lebih mudah dalam proses belajar mengajar dibandingkan buku BSE yang harus diunggah dari internet, dan baru diprint/kopi untuk dibagikan kepada setiap siswa. Cara ini juga menjadikan harga buku sekolah menjadi lebih mahal karena harus memcetak/print seluruh buku sekolah yang diunggah dari internet. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang staf guru SDN 15 Ulu Gadut:

“.. awalnya kami tidak mengerti program BSE ini, karena saya sendiri tidak terlalu bisa menggunakan komputer. Kalau di sekolah, komputer hanya dipakai oleh tata usaha untuk buat laporan sekolah. Tapi setelah program BSE dicetak dalam buku, saya menjadi paham dengan buku-buku yang ada dalam program ini..⁶⁴”

Pemahaman yang kurang ini, juga diutarakan kasi pembinaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, didapat data sebagai berikut:

“...pada awal sosialisasi program BSE mereka mengalami kebingungan karena harus menggunakan perangkat komputer dan internet untuk menjelaskan program ini pada utusan sekolah. Karena setiap sekolah juga tidak seluruhnya memiliki perangkat ini, sehingga transfer pengetahuan program ini mengalami kendala. Selanjutnya ketika implementasi program BSE dalam bentuk virtual dilakukan, banyak sekolah belum siap karena tenaga guru yang menguasai bidang ini masih sedikit. Namun ketika program ini dibuat dalam bentuk cetak, pemberian pemahaman program BSE pada implementor lebih mudah dilakukan...⁶⁵”

⁶⁴ wawancara dengan Ibu Dra Nelfida, guru SDN 15 Ulu Gadut, 24 Maret 2010, pukul 11.50 WIB

⁶⁵ wawancara dengan Dra.Laila Fatma, kepala seksi pembinaan SD Dinas Kota Padang, 20 Maret 2010, pukul 11.55 WIB

Dari hasil wawancara tersebut, menggambarkan tingkat pemahaman guru di sekolah pada awal implementasi program BSE dalam bentuk virtual. Seiring dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat/ guru (tidak semua guru maupun sekolah memiliki fasilitas komputer dan internet), Depdiknas kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang merupakan evaluasi dari implementasi BSE dalam bentuk virtual dengan menghadirkan program BSE dalam bentuk CD, dan BSE dalam bentuk cetak.

Kehadiran BSE generasi baru ini, lebih mendapat sambutan dari implementor (guru-guru), maupun sasaran dari program ini yaitu siswa. Setidaknya mereka sudah lebih memahami program BSE, dan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh BSE sebagai bahan ajar di sekolah. Seperti yang diungkapkan Ibu Sumarni (guru SDN 15 Ulu Gadut:

“ .. materi yang ada di buku sekolah elektronik ini tidak jauh berbeda dengan buku dari penerbit lain. Selain lebih ringkas dan memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Kami juga tidak mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskannya pada siswa di kelas ketika mengajar..”

Peneliti juga menanyakan hal yang sama pada siswa di sekolah tersebut, sejauh mana siswa mengerti materi yang disampaikan oleh guru yang menggunakan BSE di kelas mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Violita Andriani (siswa SDN 15 Ulu Gadut) :

“.. di kelas kami menggunakan BSE yang dipinjamkan sekolah sebagai buku pegangan. Kalau dibandingkan buku Erlangga, aku lebih suka buku BSE, terutama buku matematika. Karena bukunya lebih ringkas dan tidak rumit jadi lebih mudah untuk belajar. Soal-soal di buku BSE juga lebih sulit dari pada buku Erlangga. Jadi aku lebih suka buku ini. Jadi ketika guru menjelaskan menggunakan BSE saya mudah mempelajarinya..”

Perbandingan tingkat pemahaman guru di sekolah pada implementasi program BSE dapat dilihat pada tabel 5.4:

Tabel 5.4 Perbandingan Pemahaman Guru Pada Program BSE

No	Program BSE dalam bentuk virtual (http://bse.depdiknas.go.id)	
	SDN 03 Kampung Dalam & SDN 15 Ulu Gadut	SDN Percobaan Ujung Gurun
1	Kepala sekolah dan guru-guru tidak paham dengan program BSE dalam bentuk virtual. Keterbatasan prasarana (komputer, internet) serta SDM menjadi hambatan implementasi program ini.	Kepala sekolah dan guru sudah paham dengan program BSE. Ketersediaan prasarana (lab komputer, jaringan internet) serta kemampuan guru menggunakan prasarana ini mempermudah sosialisasi program pada siswa.
	Program BSE dalam bentuk CD	
2	Depdiknas membagikan CD program BSE ke sekolah untuk digunakan sebagai bahan ajar. CD yang dibagikan ini kemudian diserahkan kepada guru-guru untuk dipergunakan. Namun tidak semua sekolah/guru memiliki komputer untuk membuka program ini. Selain itu, untuk mencetak program ini juga membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga guru-guru tidak menggunakan program ini di sekolah.	Guru-guru mulai memanfaatkan CD BSE sebagai bahan ajar, namun tidak dibagikan kepada para siswa.
	Program BSE dalam bentuk cetak	
3	Sekolah maupun guru mulai menggunakan BSE sebagai bahan ajar, menggantikan buku paket yang biasa digunakan. Siswa mendapatkan buku BSE secara gratis, dengan meminjam di perpustakaan. Guru-guru juga sudah mengerti penggunaan BSE dalam bentuk cetak.	Sekolah menggunakan dua model BSE (cetak dan virtual). baik guru maupun siswa di sekolah sudah mengerti cara penggunaan program ini, dan tidak mengalami kesulitan mempelajari BSE dalam bentuk cetak jika dibandingkan dengan buku Erlangga, Yudistira, dll.

Sumber : Data Olahan Peneliti, tahun 2010

Berdasarkan tabel 5.4, dapat dideskripsikan perubahan tingkat pemahaman implementor (guru) dalam implementasi program BSE. Mulai dari penolakan hingga setuju dan mengajarkan program BSE pada siswa. Semakin baik tingkat pemahaman guru-guru pada program BSE mempengaruhi keputusan guru untuk mengajarkan BSE pada siswa-siswa di sekolah.

Tingkat pemahaman yang berbeda pada implementor pada implementasi program BSE peneliti anggap masih dalam batas kewajaran. Ketidakpahaman implementor maupun sasaran dari program ini disebabkan penggunaan teknologi seperti komputer dan internet. Penggunaan fasilitas ini juga masih sangat terbatas. Masyarakat belum begitu paham menggunakan alat ini, dan ketika pemerintah mengeluarkan program yang menggunakan TI, ada kecanggungan untuk melaksanakannya. Namun hal ini dapat diatasi jika jauh sebelum program ini dilaksanakan, Depdiknas bekerjasama dengan Depkominfo untuk mensosialisasikan, serta memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan komputer dan internet.

5.1.5 Analisis Program BSE Berdasarkan Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna

Dimensi lain yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi dan koordinasi. Dimensi komunikasi dalam penelitian ini memegang peranan penting berhasilnya suatu program. Kerena dengan komunikasi yang baik, program/ kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, penyampaian

instruksi/perintah harus lebih diperhatikan. Kesalahan dalam komunikasi akan berakibat fatal pada implementasi kebijakan publik.

Salah satu bentuk komunikasi dalam implementasi program BSE adalah melalui surat edaran, kontak lisan, dan lain sebagainya. Sedangkan wujud dari koordinasi dari implementasi program dapat berupa surat pertanggungjawaban (SPJ). Pola komunikasi dan koordinasi program BSE ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut:

“...untuk mempermudah pelaksanaan program BSE, maka pola komunikasi yang kami terapkan SD melalui UPTD yang ada pada masing-masing kecamatan, dan SMP/SMA melalui kepala sekolah KPPS. Lewat cara ini, lebih memudahkan sekolah mengetahui informasi tentang BSE. Sedangkan untuk melihat keberhasilan program dan pemanfaat dana yang sudah diberikan, maka sekolah harus membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS untuk BSE..⁶⁶”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat pola komunikasi dan koordinasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Padang pada sekolah dasar yang ada. Untuk melihat komunikasi dan koordinasi program BSE pada tingkat dasar (sekolah), maka peneliti menanyakan pola koordinasi dan komunikasi yang ada di sekolah. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah SDN Percobaan, maupun SDN 03 dan 15 sebagai berikut:

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd, 18 Maret 2010, pukul 11.00 WIB

“..program BSE di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Kami mendapatkan informasi ini juga dari UPTD yang ada per kecamatan. Setelah sosialisasi program, saya langsung mengadakan rapat pada majelis guru untuk menjalankan program ini..⁶⁷”

Ketiga sekolah yang peneliti umumnya mengikuti alur komunikasi yang sudah ada, mulai dari dinas pendidikan, kemudian disalurkan pada UPTD per kecamatan untuk dikomunikasikan kembali pada kepala sekolah, dan terakhir pada siswa di sekolah. Pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah pada siswa tentang program BSE dapat dilihat pada hasil wawancara peneliti dengan siswa sebagai berikut:

“.. saya tidak tahu program BSE sebelumnya, sampai waktu ada kakak yang mengajarkan program BSE untuk kami. Setelah itu baru program BSE yang saya pelajari disediakan sekolah dalam bentuk buku pelajaran yang dipinjamkan untuk belajar sekarang..⁶⁸”

Komunikasi dan koordinasi pada implementasi program BSE dilakukan berdasarkan garis perintah pada struktur organisasi. Struktur organisasi tertinggi seperti pimpinan memberikan perintah pada bawahan untuk melaksanakan program, seperti menteri pendidikan pada kepala dinas, kepala dinas pada kepala sekolah, kepala sekolah pada staf pengajar yang ada di sekolah masing-masing. Pola komunikasi ini menentukan tingkat kephahaman dari masing-masing implementor di lapangan.

⁶⁷ Wawancara dengan Sarman Nur, kepala sekolah SDN Percobaan Ujung Gurun, Selasa, 23 Maret 2010, pukul 12.10WIB)

⁶⁸ wawancara dengan Aldi Syah Putra, siswa SDN 03 Kampung Dalam, Selasa, 23 Maret 2010, pukul 11.10WIB

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan program BSE di Kota Padang, dapat dikatakan baik. Pola komunikasi pelaksanaan program BSE dapat dilihat pada tabel 5.5:

Tabel 5.5 Pola Komunikasi implementasi program BSE

No	Informan	Fasilitas
1	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Program BOS maupun BSE di sosialisasikan Dinas Pendidikan pada seluruh sekolah melalui rapat rutin yang dilakukan. Selain itu, untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan program ini, setiap sekolah memberikan SPJ dari program yang dilaksanakan di sekolah masing-masing.
2	Kepala Seksi TK, dan SD	Kepala pendidikan TK dan SD menjalankan tugasnya dalam membantu tugas kepala Dinas Pendidikan. Salah satunya melakukan komunikasi pada sekolah pada pelaksanaan program BSE. Sedangkan dalam hal koordinasi, kepala seksi pembinaan SD langsung pada kepala dinas dalam pelaporan hasil evaluasi setiap perkembangan program BSE dari hasil laporan/ SPJ yang telah dikirim sekolah pada Dinas Pendidikan kota.
3	Kepala sekolah SDN 03 Kampung Dalam	Program ini dikomunikasikan dari kepala sekolah pada majelis guru melalui rapat rutin sekolah. Kemudian program ini juga disosialisasikan pada wali murid di awal tahun ajaran baru ketika setiap siswa baru memulai proses belajar mengajar. Sebagai bentuk koordinasi, sekolah memberikan SPJ dan koordinasi pada dinas dalam penggunaan alokasi BOS buku.
4	Kepala sekolah SDN 15 Ulu Gadut	Sosialisai program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota dengan membagikan CD program BSE pada sekolah, dikomunikasikan pada majelis guru. Pola koordinasi yang dilakukan bisa dilakukan pada saat rapat-rapat dengan Dinas Pendidikan, SPJ BOS buku setiap tahunnya.
5	Kepala sekolah SDN Percobaan	Program ini dikomunikasikan dari kepala sekolah pada majelis guru melalui rapat rutin sekolah. Kemudian program di sosialisasikan wali murid. Sedangkan sosialisai program pada siswa dilakukan dalam pelajaran komputer melalui praktek langsung. Bentuk koordinasi pada Dinas Pendidikan Kota melalui SPJ dan laporan anggaran sekolah yang dapat diakses oleh umum pada website sekolah.

Sumber : Data Olahan Peneliti, tahun 2010

Komunikasi yang intensif juga menjadi sarana evaluasi implementasi program BSE. Perubahan bentuk program BSE dalam bentuk elektronik yang hanya dapat diakses melalui internet, kini dapat dinikmati dalam bentuk cetak. Ini merupakan hasil dari komunikasi implementor dalam menanggapi semua keluhan ataupun kendala yang dihadapi oleh sekolah, terutama para siswa yang tidak memiliki fasilitas komputer, internet ataupun biaya untuk mengakses dan mencetak BSE. Rangkaian pola komunikasi mulai dari bawah ke atas (*top down*) , menjadi evaluasi perbaikan implementasi program ini.

Hal yang paling mendasar dari implementasi BSE pada tingkat sekolah adalah pola komunikasi antara guru dan murid dalam menggunakan BSE sebagai bahan ajar. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan komunikasi antara guru dan murid pada proses belajar mengajar menggunakan BSE ini, cukup baik. Ini dapat dibuktikan dengan tingkat pemahaman siswa pada materi yang diberikan oleh guru di kelas.

Koordinasi

Koordinasi dalam menjalankan sebuah kebijakan mutlak dibutuhkan. Seperti halnya komunikasi, koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi program BSE SD di Kota Padang juga diperlukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam koordinasi, yaitu :

1. Perlu ditentukan secara jelas lembaga/institusi yang diserah-tugaskan secara fungsional yang mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan program tersebut. Institusi dalam implementasi program BSE ini sudah

ditetapkan sebelumnya, yaitu Depdiknas, hingga Dinas Pendidikan Kota Padang yang menjadi implementor di lapangan.

2. Dalam pelaksanaan program, perlu dituangkan dalam prosedur yang jelas sehingga semua pihak perlu mentaati dan mempedomani. Prosedur pengambilan kebijakan, maupun tanggung jawab berdasarkan garis perintah. Prosedur ini sangat penting dalam implementasi sebuah kebijakan.

Ada banyak masalah yang terjadi di lapangan akibat koordinasi yang tidak sempurna/ efektif. Masalah ini timbul akibat adanya perbedaan orientasi atau tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, koordinasi sangat berkaitan erat pada pola komunikasi. Jika komunikasi tidak lancar, maka akan berpengaruh pada pola koordinasi pada seluruh implementor dalam menjalankan program. Salah satu mekanisme dalam pola koordinasi adalah hirarki manajerial.

Hirarki manajerial menjelaskan pola koordinasi dalam bentuk rantai perintah dalam organisasi, aliran informasi, hubungan tanggung jawab, akuntabilitas yang jelas. Koordinasi pada pelaksanaan program BSE dapat dilihat pada rantai perintah pelaksanaan program mulai dari pusat (Depdiknas) hingga pada daerah (Dinas Pendidikan Kota Padang). Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan program ini, secara fisik dapat dilihat dari SPJ yang dibuat oleh setiap sekolah dalam penggunaan dana BOS buku yang diberikan pemerintah pusat. Bentuk dari SPJ ini dapat dilihat pada lampiran 2. Seperti yang dikemukakan oleh kepala sekolah SDN 15 Ulu Gadut Ibu Ernawati, S.Pd:

"... setiap tahunnya kami membuat SPJ dari penggunaan dana BOS, yang akan diserahkan pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Untuk tahun 2010 SPJ belum selesai, karena kami baru membeli beberapa buku, ini disebabkan dana yang turun untuk dana BOS diberikan secara bertahap."⁶⁹

SPJ tiap sekolah ini kemudian akan dilaporkan pada pemerintah pusat melalui laporan Dinas Pendidikan Kota Padang. SPJ yang diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengetahui perkembangan program, serta sebagai bahan pertimbangan evaluasi program kedepannya. Kejelasan dari penggunaan anggaran ini, dapat mengindikasikan berjalannya pola koordinasi yang baik. Selain itu koordinasi juga menjadi salah satu hubungan pertanggungjawaban dari bawahan pada atasan, apakah program yang dilaksanakan berjalan/ tidak.

Berdasarkan analisis implementasi program BSE yang peneliti lakukan di Kota Padang, maka sudah dapat menggambarkan implementasi program ini. Program BSE mendapat penolakan dari guru-guru di sekolah, disebabkan kurangnya pemahaman guru tentang BSE yang harus menggunakan media komputer dan internet. Akibat dari ketidakpahaman guru-guru ataupun siswa untuk mengakses program BSE ini berujung pada tidak adanya kesepakatan untuk menggunakan program ini.

Selain adanya perbedaan tingkat kepaahaman dari guru-guru, faktor anggaran juga menjadi kendala. Minimnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk alokasi BSE ini, menambah beban pihak sekolah untuk menyediakan buku untuk para siswa. Disisi lain pihak sekolah tidak dibenarkan untuk menjual buku dari penerbit lain sesuai dengan Permendiknas tentang pelarangan penjualan buku di sekolah. Ini

⁶⁹ *Ibid.*, wawancara kepala sekolah SDN 15 Ulu Gadut

menyebabkan untuk beberapa saat murid-murid tidak mendapat buku pelajaran, menunggu anggaran BOS yang cair secara bertahap yang kemudian baru digunakan sekolah untuk membeli BSE dari penerbit. Alternatif yang ditempuh adalah membebaskan siswa untuk membeli buku dari toko buku, sampai buku BSE yang dibeli pihak sekolah tersedia. Ini menyebabkan siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan baik, dan menyebabkan orang tua mengeluarkan biaya yang sama untuk memenuhi kebutuhan buku anak-anaknya.

Program BSE membutuhkan bantuan teknologi seperti komputer dan internet. Tidak semua sekolah, guru, ataupun siswa memiliki perangkat ini. Selain faktor harga, kemampuan sasaran kebijakan ini juga masih terbelah awam pada dunia TI. Hal ini wajar terjadi pada program yang harus bersentuhan dengan teknologi. Keberhasilan ataupun kegagalan program ini peneliti rasa lebih pada peningkatan kemampuan sasaran program ini untuk lebih optimal. Hambatan pada sarana dan prasarana pendukung program BSE ini dapat diatasi jika pemerintah juga menganggarkan pembelian perangkat komputer untuk sekolah dasar.

Setelah program ini berjalan tiga tahun, dampak dari program ini baru mulai dirasakan oleh sasaran program (guru, siswa, masyarakat), seperti orang tua tidak lagi mengeluarkan biaya pembelian buku pelajaran. Penyediaan buku murah, bermutu dan mudah diperoleh sudah tercapai. Setidaknya dengan anggaran BOS untuk BSE, siswa dapat menggunakan buku yang dipinjamkan sekolah dalam proses belajar mengajar. Sedangkan pada sekolah yang memiliki prasarana komputer dan internet, tujuan awal program BSE untuk merangkasang siswa untuk lebih kreatif dengan bantuan teknologi serta tidak lagi gagap teknologi dapat tercapai di SDN Percobaan Ujung

Gurun. Adanya sosialisasi BSE dalam bentuk virtual juga membuat siswa mulai menggunakan internet untuk mengakses program ini.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan program BSE di Kota Padang, dapat dikatakan baik. Dari beberapa syarat yang diajukan sebagai pertimbangan dari keberhasilan sebuah implementasi Hogwod dan Gunn mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program ini. Pola koordinasi dan komunikasi terus dilakukan seluruh aktor yang terlibat dalam kebijakan ini.

Tabel 5.6 Indikator Keberhasilan Program BSE

No	Indikator implementasi	SDN 03 Kampung Dalam	SDN 15 Ulu Gadut	SDN Percobaan
1	Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.	Tidak ada pengaruh pada kondisi eksternal	Tidak ada pengaruh pada kondisi eksternal	Tidak ada pengaruh pada kondisi eksternal
2	Tersedianya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu	Tidak memiliki sarana dan prasarana, ketergantungan anggaran	Tidak memiliki sarana dan prasarana, ketergantungan anggaran	Memiliki SDM, sarana dan prasarana, ketergantungan pada anggaran
3	Apakah hubungan saling ketergantungan kecil	Tidak ada ketergantungan pada instansi lain	Tidak ada ketergantungan pada instansi lain	Tidak ada ketergantungan pada instansi lain
4	Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan	Paham dengan konsep BSE, dan kesepakatan untuk menjalankannya	Paham dengan konsep BSE, dan kesepakatan untuk menjalankannya	Paham dengan konsep BSE, dan kesepakatan untuk menjalankannya
5	Berdasarkan komunikasi dan koordinasi yang sempurna	Komunikasi dan koordinasi yang lancar	Komunikasi dan koordinasi yang lancar	Komunikasi dan koordinasi yang lancar

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2010

5.1.6 Analisis Program Terhadap Kendala Yang Dihadapi Pada Implementasi Program BSE SD di Kota Padang

Untuk mencapai tujuan program BSE, Depdiknas sudah melakukan banyak upaya. Baik melalui penyediaan program BSE dalam bentuk virtual yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun tanpa dikenakan biaya, penyebaran BSE dalam bentuk CD, hingga menambah alokasi dana BOS untuk pembelian buku BSE yang dapat digunakan siswa di sekolah. Program BSE sebenarnya mempunyai kendala-kendala atau hambatan untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya.

Hambatan yang dirasakan oleh implementor di lapangan seperti data yang peneliti peroleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan prasarana seperti komputer dan jaringan internet sebagai pendukung program BSE di sekolah. Sekolah umumnya tidak memiliki perangkat komputer dan jaringan internet untuk mengajarkan siswa program BSE yang dapat diakses pada situs Depdiknas. Ini juga berdampak pada minimnya pengetahuan siswa pada program BSE dalam bentuk virtual.
2. Anggaran BSE dari alokasi dana BOS yang masih minim (Rp. 15.000/ siswa), jika harus dianggarkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan buku siswa sebanyak 6/8 mata pelajaran.
3. Kapasitas implementor (guru) untuk mengoperasikan komputer dan internet masih minim. Selain kecanggungan menggunakan perangkat TI, faktor usia juga menyebabkan guru-guru enggan menggunakan perangkat ini. Hanya 30% tenaga guru yang bisa menggunakan media komputer dan internet, sehingga

pada awal peluncuran program BSE dalam bentuk virtual, sekolah kurang memiliki SDM untuk mengajarkannya pada siswa

4. Penolakan program BSE oleh guru-guru di sekolah, yang disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman guru menggunakan program BSE dalam bentuk virtual. Ini merupakan akumulasi dari minimnya kemampuan guru menggunakan komputer dan internet, maupun *behavior* guru untuk lebih menyukai buku cetak dibandingkan BSE dalam bentuk virtual.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi regulator untuk membuat kebijakan/program yang lebih dapat diterima oleh masyarakat/ sasaran program. Hambatan-hambatan ini juga dapat diatasi dengan perbaikan program BSE yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan BSE secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi program BSE SD di Kota Padang sudah berlangsung dari tahun 2008. Program ini baru diterapkan secara utuh setelah program ini dialihmediakan dalam bentuk cetak dari bentuk virtual. BSE merupakan program pusat yang diterapkan di daerah. Tujuan program ini adalah menyediakan buku murah, berkualitas dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Selain itu program ini juga juga merangsang siswa untuk lebih kreatif dengan bantuan teknologi, sehingga tidak gagap teknologi. Sasaran utama dari program BSE ditujukan siswa, guru dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pada program ini, Depdiknas menyiapkan kurang lebih 500 buah judul buku yang dapat *download* oleh pelanggan pada situs <http://bse.depdiknas.go.id>. Program ini kemudian di buat dalam bentuk cetak berupa buku yang dapat dinikmati oleh siswa melalui alokasi anggaran dana BOS Buku yang merupakan salah satu bagian dari dana BOS. Untuk itu peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi program buku sekolah elektronik di Kota Padang. Berdasarkan realita di lapangan yang diukur melalui 5 syarat implementasi kebijakan menurut Hoogwod dan Gunn.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi program buku sekolah elektronik di Kota Padang cukup baik. Walaupun banyak kendala yang ditemui selama pelaksanaan dari program ini, khususnya pada sekolah dasar. Adapun hasil

dari aspek-aspek yang diukur dalam implementasi program buku sekolah elektronik di Kota Padang ini antara lain:

1. Berdasarkan kondisi eksternal

Kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi program buku sekolah elektronik di Kota Padang adalah struktur wewenang, yaitu pengambilan keputusan yang sangat tergantung pada struktur dari organisasi itu sendiri. Pergantian menteri pendidikan, kepala dinas, ataupun kepala sekolah adalah salah satu dari kondisi eksternal dalam implementasi program ini. Namun setelah terjadinya dua periode yang berbeda, yakni pergantian menteri maupun kepala sekolah program ini terus berjalan. Ini mengindikasikan kondisi eksternal seperti pergantian pimpinan organisasi publik tidak mempengaruhi pelaksanaan dari program yang sudah berjalan sejak tahun 2008 ini.

2. Berdasarkan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu

Sumber daya merupakan salah satu keberhasilan dari sebuah pelaksanaan dari kebijakan. Salah satu sumber daya adalah finansial, sarana dan prasarana pendukung, serta waktu yang ada untuk menjalankan program. Dari segi sumber daya finansial, baik Depdiknas, Dinas Pendidikan maupun sekolah sangat membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Selain untuk membeli buku pelajaran yang akan dibagikan kepada seluruh siswa, Depdiknas membutuhkan anggaran untuk membayar royalti

dari judul buku yang termasuk dalam list buku dalam program BSE. Selain itu untuk mengelola website <http://bse.depdiknas.go.id> juga membutuhkan dana. Implementasi program BSE dalam bentuk virtual masih sangat jarang ditemui, kecuali pada sekolah yang memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet. Selain itu tenaga pengajar yang menguasai kedua fasilitas ini juga masih sangat kurang. Rata-rata sekolah dasar di Kota Padang hanya memiliki 30% staf pengajar yang menguasai alat ini. Ini menyebabkan sosialisasi program ataupun pengajaran program BSE pada sekolah konvensional tidak dapat dilakukan.

Dari sisi waktu, implelementasi program BSE bisa dikatakan cukup berhasil. Dalam kurun waktu tiga tahun program ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh sekolah dan siswa di tanah air. Selain penggunaan media masa sebagai sarana sosialisasi, alokasi dana BOS untuk membeli buku ini menjadi salah satu keberhasilan pemanfaatan waktu yang efektif dalam pelaksanaan program BSE.

3. Berdasarkan hubungan saling ketergantungan kecil

Hubungan saling ketergantungan dalam implementasi program BSE sangat kecil. Pelaksana dari program ini adalah Depdiknas selaku pemegang otoritas pendidikan di Indonesia. Untuk mempermudah program BSE ini, maka Depdiknas melimpahkan program ini pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Dengan dilaksanakannya program BSE pada Depdiknas sebagai

organsiasi tunggal, akan memperkecil faktor kepentingan yang akan terjadi ketika program dilaksanakan.

4. Berdasarkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan

Tingkat kepaahaman implementor dalam menjalankan program ini cukup baik. Dengan adanya kesepakatan dari masing-masing pihak yang terkait di dalamnya, menyebabkan program ini berjalan dengan baik. Pemberian pemahaman tentang program baik melalui sosialisasi, seminar, pelatihan maupun rapat koordiansi yang dilakukan oleh dinas maupun kepala sekolah pada staf guru di sekolah mempercepat proses pemahaman akan program yang di jalankan.

5. Berdasarkan Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna

Komunikasi dan koordinasi yang baik merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi, terlebih lagi dalam pelaksanaan tugas. Komunikasi yang baik dalam menyampaikan/ sosialisasi program, baik antara atasan pada bawahan, regulator pada implementor sangat dibutuhkan. Kesalahan dalam komunikasi akan berpengaruh pada tingkat kepaahaman maupun koordinasi. Salah satu bentuk komunikasi dalam implementasi perogran BSE adalah melalui surat edaran, kontak lisan, dan lain sebagainya. Sedangkan wujud dari koordinasi dari implementasi program dapat berupa surat pertanggung jawaban (SPJ).

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Kota Padang, maupun beberapa sekolah dasar dan hasil penelitian yang ditemukan, maka untuk implementasi program BSE diperlukan beberapa hal:

1. Menambah prasarana sekolah berupa perangkat komputer untuk siswa
2. Memperbesar alokasi dana BOS untuk pembelian BSE dalam bentuk cetak
3. Pelatihan komputer maupun program edukasi untuk guru-guru disekolah berbasis TI
4. Sosialisasi program BSE yang lebih masif pada sasaran program (guru, siswa dan masyarakat).
5. Adanya partisipasi masyarakat/sektor swasta untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah.

Daftar Pustaka

Buku

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Keban, Yeremias T.. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kota Padang dalam Angka. 2007. BPS
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Permana, Eko. dkk. 2009. "Pelatihan Program E-Book Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pada Sekolah Dasar Di Kota Padang" Laporan Akhir Program Kretifitas Mahasiswa. Padang: Universitas Andalas
- Robin, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Indeks
- Subarsono, Agus. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Simpul Demokrasi. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang: PlaCID's Averroes Press
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Edisi Kedua Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*. Jakarta: Intermedia

Buku Metode

- Afrizal. 2005. *Metode Penelitian Sosiologi II*. Padang: Fisip.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya

Ritzer. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers

Skripsi

Ilham, Muhamad. 2008. Skripsi. "Peranan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Study Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Jetak Probolinggo". Probolinggo: IAIN Sunan Ampel

Widiastuti, Paulina Yoga. 2009. Skripsi. "Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik (Studi Deskriptif Kualitatif Proses Keputusan Inovasi Program Buku Sekolah Elektronik di Kalangan Guru SMA Negeri 4 Surakarta) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jurnal

Hartono. 2008. Strategi Pembelajaran *Active Learning*. jurnal pendidikan. vol:4

Nanan Hasanah. (...) Implementasi Perpustakaan Digital di Institute Teknologi Bandung. vol. 6. No. 12. (<http://www.akademik.unsri.ac.id/>). diakses 7 Maret 2010

Website

[http://todoeducare.posterous.com/Penyebab Mahalnya Biaya Sekolah](http://todoeducare.posterous.com/Penyebab_Mahalnya_Biaya_Sekolah). diakses pada tanggal 5 Desember 2009

www.diknas-padang.org/7.682 Anak Putus Sekolah. Dikpora Siapkan Bea Siswa Rp9,9 M. diakses pada tanggal 9 November 2009

www.bse.depdiknas.go.id. Sambutan Mendiknas dalam Peluncuran BSE. diakses pada tanggal 20 September 2008

<http://kdn.co.id/bse-buku-sekolah-elektronik>. diakses tanggal 20 Juli 2010

<http://main.telkomspeedy.com/sambutan-menteri-pendidikan-bse>. diakses tanggal 5 Desember 2009

www.padang.go.id/profil-kota-Padang. diakses pada tanggal 18 April 2010

<http://www.padang-today.com>. Peluncuran Buku Cetak BSE Padang Ekspres. diakses tanggal 14 Januari 2010

http://jardiknas.kemendiknas.go.id//indeks_php?option=com_content=article&id=1517_pelatihan_konten_jardiknas_provinsi_sumatera_barat, diakses tanggal 13 Oktober 2010

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008

Pedoman Wawancara
Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik SD di Kota Padang

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

1. Kapan program BSE mulai di terapkan di Kota Padang ?
2. Siapa yang melaksanakan program BSE di Kota Padang?
3. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program BSE di Kota Padang ?
4. Bagaimana Bapak mengkomunikasikan program BSE ke sekolah ?
5. Apakah ada pelatihan/ sosialisasi yang dilakukan dinas pada sekolah?
6. Apakah ada peraturan/ surat edaran yang diberikan ke sekolah untuk melaksanakan program BSE?
7. Apakah pihak sekolah sudah mengerti dengan program BSE?
8. Bagaimana ketersediaan prasarana pendukung program BSE ?
9. Apakah sekolah yang harus menyediakan prasarana pendukung BSE?
10. Berapa alokasi anggaran yang disediakan untuk program BSE?
11. Bagaimana bentuk pengawasan dinas pendidikan pada program BSE di sekolah?
12. Bagaimana bentuk koordinasi dari pelaksanaan program BSE pad SD di Kota Padang?
13. Setelah dua tahun berjalan, bagaimana perkembangan program BSE ?
14. Apakah program ini akan terus berjalan, walaupun berganti pimpinan di dinas pendidikan?
15. Mengapa program BSE mengalami perubahan dari bentuk virtul menjadi cetak?
16. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program BSE di sekolah dasar?

Kepala Sekolah SDN (03,15, Percobaan)

1. Kapan program BSE mulai di terapkan di sekolah Bapak/Ibu ?
2. Bagaimana Bapak/ Ibu mengkomunikasikan program BSE pada staf pengajar ?
3. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program BSE di sekolah Bapak/Ibu?
4. Apakah ada pelatihan/ sosialisasi yang diikuti oleh staf pengajar untuk program BSE di sekolah Bapak/Ibu?
5. Apakah pihak staf pengajar di sekolah Bapak/Ibu sudah mengerti dengan program BSE?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh staf pengajar ketika program BSE ini baru dimulai?

7. Apakah ada peraturan/ surat edaran dinas pendidikan Kota Padang yang diterima sekolah untuk melaksanakan program BSE?
8. Bagaimana ketersediaan prasarana pendukung program BSE di sekolah Bapak/Ibu ?
9. Apakah sekolah yang memiliki prasarana pendukung BSE?
10. Apakah alokasi anggaran yang disediakan untuk program BSE di sekolah Bapak/Ibu sudah cukup?
11. Bagaimana bentuk koordinasi pihak sekolah pada dinas pendidikan terkait pelaksanaan program BSE di sekolah Bapak/Ibu ?
12. Bagaimana pendapat staf pengajar tentang perubahan program BSE virtual menjadi cetak?
13. Apakah program ini akan terus berjalan, walaupun berganti kepala sekolah di sekolah Bapak/Ibu?
14. Apakah ada kendala dalam melaksanakan program BSE di sekolah Bapak/Ibu?

Siswa

1. Sejak kapan adik tahu program BSE?
2. Apakah sekolah memberi tahu program BSE pada adik?
3. Bagaimana pendapat adik dengan program BSE?
4. Apakah sekolah menyediakan buku BSE?
5. Bagaimana pendapat adik tentang buku BSE?
6. Apakah guru-guru di kelas bisa menerangkan pelajaran dengan baik menggunakan buku BSE/program BSE virtual?

Lampiran



Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SDN 03 Kampung Dalam Padang



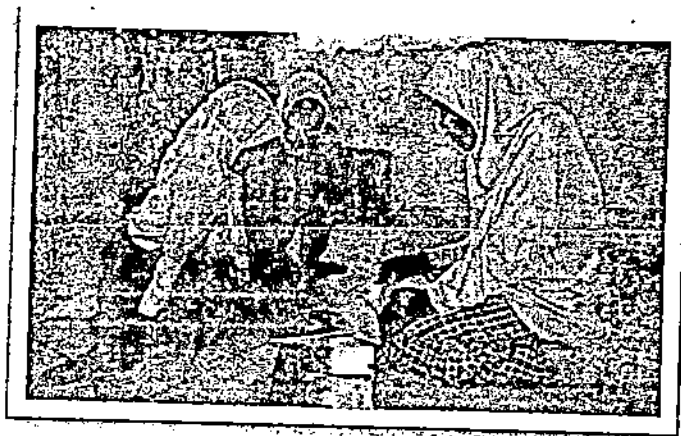
Wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah dan tenaga pengajar SDN 15 Ulu Gadut Padang



Wawancara peneliti dengan Orang Tua Siswa SDN Percobaan Ujung Gurun



Kondisi Laboratorium Komputer SDN Percobaan Ujung Gurun



Wawancara peneliti dengan Siswa SDN 15 Ulu Gadut Padang



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Ala Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. 03- 60 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari Pembantu Dekan I, FISIP Unand

Nomor : 594/H.16.09/PP-2010 Tanggal 10 Maret 2010

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 10 Maret 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : FATHIAH LISWARMMUNAF
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 3 November 1986
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Binuang Kampung Dalam Pauh Padang
Maksud Penelitian : Penulisan Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL : Implementasi Program Buku Sekolah Elektro-
nik di Kota Padang.
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - Dinas Pendidikan Kota Padang
- SDN 09, SDN 03, SD Percontohan, SD Ulu
Anggota Rombongan : Gadut
--

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

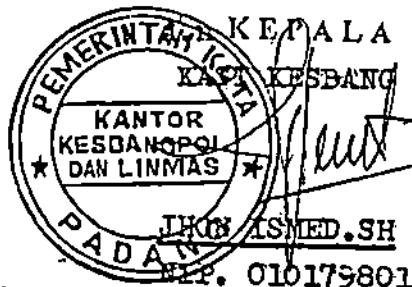
Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 10 Maret 2010



ruskan kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Kepala SDN 09 Kampung Dalam Pauh

Kepala SDN 03 Alai

Kepala SD Percontohan

Kepala SD Ulu Gadut

Pembantu Dekan I, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unand

Yang bersangkutan

Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554 - 21825 Fax. (0751) 21554 Website : <http://www.diknas-padang.org>

Izin Penelitian
Nomor ~~1420~~420/DP/KPMP/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan surat Pembantu Dekan 1 Universitas Andalas Nomor: 594/H.16.09/PP-2010 perihal izin penelitian, pada prinsipnya dapat memberilam izin untuk melaksanakan penelitian tersebut kepada:

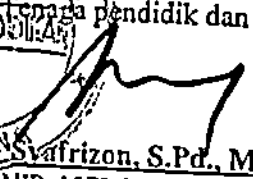
Nama/NIM : Fathiah L. Munaf
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik di Kota Padang
Lokasi : SDN 09 Kampung dalam, SDN Ulu Gadut, SDN 03 Alai, SD Percontohan
Jadwal : Bulan Maret - Mei 2010

Dengan ketentuan :

1. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses belajar mengajar
2. Setelah selesai melaksanakan pengumpulan data penelitian memberikan 1 (satu) usulan rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang, up. Bidang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar jam belajar siswa.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Maret 2010


An. Kepala
Kasi peningkatan Pengawasan Mutu
Tenaga pendidik dan kependidikan

Syafrizon, S.Pd., M.Pd.
NIP. 1972 0418 1994 12 1 002

Tembusan :

1. Bapak kepada dinas pendidikan Sumatera Barat
2. Bapak kepala sekolah SDN 03 Alai
3. Bapak kepala sekolah SDN 09 Kampung dalam
4. Bapak kepala sekolah SD Percontohan
5. Bapak kepala sekolah SD Ulu Gadut
6. Pembantu dekan I, Fakultas ilmu social dan ilmu politik Unand



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Padang Telp. (0751) 21554-21825 Fax (0751) 21554 Website : <http://www.diknas-padang.org>

Nomor : 4138 /420.DP/KPMP/2008

Lamp : 1 (satu) rangkap

Hal : Dana BOS Tahun 2009

24 Desember 2008

Kepada :

Yth.

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se Kota Padang
2. Kepala SD/ SMP/ SLB Negeri dan Swasta se kota Padang

di
PADANG

Sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/MPN/KU/2008 tanggal 8 Desember 2008 tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2009. Untuk itu, dengan hormat diinformasi pada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran BOS untuk tahun 2009 dinaikan rata-rata 50%, sehingga besaran BOS menjadi :
 - a. Untuk SD/MI Negeri dan Swasta = Rp. 400.000,- /siswa/tahun
 - b. Untuk SMP/MTs Negeri dan Swasta = Rp. 575.000,- /siswa/tahun
2. Jumlah satuan biaya BOS tersebut termasuk untuk pembelian buku teks. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta, sehingga dari keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta, bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.
5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.
6. Kepada Sekolah berkewajiban melakukan sosialisasi dana BOS pada guru, pegawai, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah dan orang tua siswa.
7. Prinsip pengelolaan keuangan dana BOS : Transparan , Akuntabel, Tertib Administrasi Keuangan. Kepala Sekolah agar membuat Papan Pengumuman BOS, yang memuat informasi tentang BOS dan pengelolaan keuangan BOS (minimal papan pengumuman berisi RAPBS dan rekapitulasi laporan bulanan penggunaan dana BOS).
8. Segera menyerahkan data jumlah siswa dan siswa miskin paling lambat tanggal 10 Januari 2009 (bila melewati tanggal tersebut maka data jumlah siswa yang akan dipakai untuk penerbitan Surat Keputusan adalah jumlah siswa pada semester Juli-Desember 2008).
9. Informasi tentang perkembangan BOS, konsultasi dan pengaduan masyarakat, dapat diakses melalui web Dinas Pendidikan Kota Padang dengan alamat : <http://www.diknas-padang.org>
10. Hal-hal lainnya bila masih diragukan dapat berkonsultasi pada Tim Manajemen BOS Kota Padang.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala

Drs. H. M Nur Amin M.Pd
NIP. 130607244

Tembusan : Yth :

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala BAWASDA Kota Padang
4. Arsip

LAPORAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)
PENGUNAAN DANA BOS BUKU
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009



SEKOLAH DASAR NEGERI 15 ULU GADUT
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAUH
KOTA PADANG

NOTULEN RAPAT

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Oktober 2008
Materi : Penetapan Judul Buku Program BOS Buku

1. Pelaksanaan Mid Semester pada tanggal 3 Nopember 2008
2. Pembelian BOS Buku dengan Judul Bahasa Indonesia seharga 12.000 per exemplar x 866 Rp. 10.392.000 dengan membuat proposal sebanyak siswa
3. Berdasarkan harga Buku Bahasa Indonesia di bawah Rp. 12.000 maka sisa dana dibelikan buku Matematika dan IPA Kelas IV s/d VI
4. Judul Buku yang sesuai dengan kebutuhan sekolah sebanyak 866 Exsplar
 - a. Kelas I sebanyak 136 exemplar
 - b. Kelas II sebanyak 153 exemplar
 - c. Kelas III sebanyak 154 exemplar
 - d. Kelas IV sebanyak 158 exemplar
 - e. Kelas V sebanyak 171 exemplar
 - f. Kelas VI sebanyak 94 exemplar
5. Penerimaan Dana BOS Buku sebanyak Rp. 10.392.000 Pembelian Buku Bahasa Indonesia
6. Sehubungan kelebihan Dana maka kami sepakat untuk menambah buku khusus kelas VI Bahasa Indonesia di tambah jumlahnya dari siswa yang ada 94 menjadi 119 mengingat kelas VI Tahun Ajaran 2009 / 2010 jumlah ditambah dari yang sekarang



RENCANA ANGGARA BELANJA (RAB)
PEMBELIAN BOS BUKU
SD NEGERI 15 ULU GADUT KECAMATAN PAUH TAHUN 2008

No.	Judul Buku	Jumlah Buku	Harga	Jumlah
I	Pengadaan Buku Bahasa Indonesia			
	1.1. Indah Bahasa & Sastra Indonesia Kelas I	136	10.654	1.448.944
	1.2. Indah Bahasa & Sastra Indonesia Kelas II	153	10.169	1.555.857
	1.3. Indah Bahasa Indonesia Kelas III	154	11.336	1.745.744
	1.4. Indah Bahasa Indonesia Kelas IV	158	9.021	1.425.318
	1.5. Indah Bahasa & Sastra Indonesia Kelas V	171	10.654	1.821.834
	1.6. Indah Bahasa & Sastra Indonesia Kelas VI	119	11.336	1.348.984
	Jumlah			9.346.681
II	Penambahan Buku IPA			
	2.1. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV	20	9.942	198.840
	2.2. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas V	20	11.563	231.260
	2.3. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VI	20	9.715	194.300
	Jumlah			624.400
	Penambahan Buku Matematika			
	3.1. Gemar Matematika Kelas V	20	11.534	230.680
	3.2. Gemar Matematika Kelas VI	20	9.685	193.700
	Jumlah			424.380
	Total			10.395.461
	Sisa Kurang			(3.461)



Padang, 11 Oktober 2008

Kepala Sekolah